

aidenvironment

# Surga yang Terbakar

*Praktik-praktik kelapa Sawit Korindo di  
Papua dan Maluku Utara*



**Dipersiapkan oleh:**

Mighty, Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan,  
SKP-KAMe Merauke dan PUSAKA

**Agustus 2016**

Foto: Hutan perawan di Papua



© Greenpeace / Ardiles Rante, 2008

Foto: Lahan yang digunduli oleh Korindo untuk kelapa sawit di Papua



© Mighty; 4 Juni 2016; 6°45'43.49"Lintang Selatan, 140°48'27.70"Bujur Timur; Kredit: Yudhi Mahendra

# Colophon

**Laporan Aidenvironment:**

Surga yang Terbakar:  
Praktik-praktik kelapa sawit Korindo  
di Papua dan Maluku Utara

**Dipesan oleh:**

Mighty, Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan,  
SKP-KAMe Merauke dan PUSAKA

**Tanggal:**

Agustus 2016

**Alamat Mighty:**

2000 M St NW #720,  
Washington, DC 20036, United States.  
[Deborah@MightyEarth.org](mailto:Deborah@MightyEarth.org)

**Foto Sampul:**

Asap membubung dari tumpukan kayu di areal konsesi  
PT Berkat Cipta Abadi milik Korindo  
©Ardiles Rante/Greenpeace; 26 Maret 2013

Aidenvironment  
Jalan Burangrang No. 18  
Bogor 16153, Jawa Barat, Indonesia  
+62 (0) 251 837 1219  
[info@aidenvironment.org](mailto:info@aidenvironment.org)  
[www.aidenvironment.org](http://www.aidenvironment.org)

Aidenvironment is part of Stichting AERA, registered at the Chamber of Commerce  
of Amsterdam in the Netherlands, number 41208024

# Surga yang Terbakar:

## Praktik-praktik kelapa sawit Korindo di Papua dan Maluku Utara

<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>5</b>
<b>Pengantar</b>	<b>7</b>
<b>1. Bisnis-bisnis kelapa sawit Korindo</b>	<b>9</b>
1.1 Perkebunan	9
1.2 Pengantar tentang Papua	11
1.3 Pengantar tentang Halmahera Selatan	12
<b>2. Praktik-praktik dan komitmen keberlanjutan</b>	<b>13</b>
2.1 Praktik: deforestasi yang meluas	13
2.2 Praktik: penggunaan api secara sistematis untuk membuka lahan	15
2.3 Praktik: pengingkaran hak masyarakat	18
2.4 Hutan yang berisiko untuk dibabat	20
2.5 Komitmen	20
<b>3. (Mantan) Pelanggan kelapa sawit Korindo</b>	<b>23</b>
<b>4. Isu-isu tiap perusahaan perkebunan</b>	<b>24</b>
4.1 PT Gelora Mandiri Membangun	24
4.2 PT Papua Agro Lestari	26
4.3 PT Berkat Cipta Abadi 1	28
4.4 PT Tunas Sawa Erma 1B	30
4.5 PT Donghin Prabhawa	32
4.6 PT Bio Inti Agrindo milik Daewoo	35
<b>5. Profil perusahaan Korindo</b>	<b>38</b>
5.1 Bisnis dan kepemilikan	38
5.2 Penebangan kayu dan kayu lapis	40
5.3 Bubur kayu	43
5.4 Manufaktur kertas koran terbesar di Indonesia	44
5.5 Keuangan	45
5.6 Industri Berat	45
5.7 Pertambangan batubara	46
5.8 Bisnis-bisnis yang lebih kecil	46
<b>Kesimpulan</b>	<b>47</b>
<b>Referensi</b>	<b>48</b>



## Ringkasan Eksekutif

Korindo, sebuah kombinasi dua kata Korea dan Indonesia, merupakan sebuah perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 20.000 ribu karyawan di Indonesia. Bisnis utamanya adalah sumber daya alam yang meliputi penebangan kayu, konsesi untuk bubur kayu dan kelapa sawit, dan produksi kayu lapis, kayu serpih (wood chips) dan minyak sawit. Bisnis-bisnis Korindo lainnya termasuk manufaktur kertas koran, industri-industri berat termasuk kincir angin, pembiayaan dan real estat. Korindo dipimpin oleh keluarga Seung dari Korea Selatan.

Pada 2013, Korindo mulai membuka hutan dataran rendah tropis secara agresif untuk perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini secara total memiliki delapan areal seluas 160.000 hektar. Tujuh areal diantaranya seluas 149.000 hektar berada di Papua. Perusahaan minyak sawit terbesar yang dimiliki Korindo berada di Papua. Sementara, areal seluas 11.000 hektar berada di Maluku Utara. Bahkan, Korindo membantu perusahaan Korea Daewoo untuk mengelola perkebunan seluas sekitar 30.000 hektar di Papua.

Dari Juni 2016, ada 75.000 hektar hutan yang berharga yang tersisa dari konsesi kelapa sawit milik Korindo. Hutan yang tersisa ini berisiko untuk dibuka oleh Korindo beberapa tahun ke depan. Menurut data dari pemerintah Indonesia, lebih dari setengah dari hutan-hutan ini masih belum tersentuh, atau disebut hutan primer.

Terdapat tiga temuan utama yang berkaitan dengan keberlanjutan dari praktik-praktik kelapa sawit milik Korindo:

- **Deforestasi** - Korindo secara keseluruhan telah membuka 50.000 hektar hutan tropis dataran rendah di Papua dan Maluku Utara di Indonesia. Luasan ini setara kira-kira dengan luas Seoul, Ibukota Korea Selatan. Sejak 2013 saja, Korindo telah membuka 30.000 hektar hutan di Papua dan Maluku Utara. Dari luasan tersebut, sekitar 12.000 hektar masih merupakan hutan primer. Korindo melakukan sedikit upaya untuk mengidentifikasi dan menjaga kawasan konservasi di dalam areal konsesinya.
- **Kebakaran** - Korindo merupakan penyumbang yang relatif besar terhadap bencana asap pada 2015 yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang luar biasa besar bagi Indonesia. Korindo menjadi penyebab terbesar di Papua. Semua bukti (citra satelit, rekaman titik api, gambar-gambar udara) mengarah pada penggunaan api yang besar dan sistematis yang dilakukan Korindo dalam proses pembukaan lahan. Hal ini merupakan tindakan ilegal di Indonesia dan Korindo mengetahui hal tersebut. Pada Oktober 2015, Wakil Gubernur Papua menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kebakaran harus segera ditutup.
- **Hak-hak masyarakat.** Secara umum, Korindo tidak mengakui hak masyarakat lokal untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) dalam setiap pembangunan baru di tanah milik masyarakat. PT Gelora Mandiri Membangun yang merupakan anak Korindo menduduki lahan pertanian dan hutan milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara. Masyarakat yang sudah ada selama beratus-ratus tahun sangat menentang keberadaan perkebunan kelapa sawit. Korindo tidak mengindahkan hak-hak adat dan tetap melanjutkan operasinya di sana.

Data perdagangan menunjukkan bahwa minyak sawit dari Korindo menasar konsumen di Eropa, Amerika Utara, China, dan India. Produk-produk itu dibeli melalui perusahaan-perusahaan perdagangan/penyulingan terkemuka. Bahkan banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut terlibat aktif dalam memastikan agar para pemasok tunduk pada kebijakan mereka tentang No Deforestation, No Peat, No Exploitation (Larangan Deforestasi, Gambut, Eksploitasi). Korindo tidak mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tiga temuan penting tersebut di atas. Dua perusahaan yang

menjadi pelanggan utama Korindo, Wilmar dan Musim Mas, sudah tidak lagi mengambil bahan dari perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan setelah kedua perusahaan memperingatkan berkali-kali bahwa Korindo harus mengubah praktik-praktiknya. Sekarang ini masih belum jelas ke perusahaan-perusahaan mana Korindo menjual minyak sawitnya.

Korindo sendiri menampilkan dirinya sendiri sebagai sebuah perusahaan yang ramah lingkungan. Akan tetapi, pengoperasian kelapa sawit yang dilakukannya mengundang keprihatinan global terhadap, seperti misalnya, hilangnya keragaman hayati, perubahan iklim, kualitas udara yang membahayakan, dan hilangnya mata pencaharian. Perusahaan-perusahaan yang bermain di perdagangan minyak sawit dunia telah membuat komitmen untuk berpegang teguh terhadap kebijakan-kebijakan No Deforestation. Namun demikian, Korindo belum memublikasikan kebijakan khusus tentang keberlanjutan.

Masalah lain menyangkut sumber-sumber kayu yang dipakai Korindo dari pihak-pihak ketiga untuk memproduksi kayu lapisnya. Perusahaan itu tidak memiliki safeguards untuk memastikan bahwa kayu yang diambil secara ilegal atau kayu yang berasal dari deforestasi tidak boleh masuk dalam sistem rantai pasokannya (supply chain).

**Foto: Burung surga makin sedikit**



© Greenpeace / Takeshi Mizukoshi.

## Pengantar

Selama bertahun-tahun, Korindo telah berhasil melarikan diri dengan kehancuran lanskap hutan hujan terakhir yang masih perawan di Indonesia. Korindo tidak mengindahkan aturan-aturan yang melarang pembakaran lahan, mengabaikan perasaan masyarakat-masyarakat lokal, serta melanggar persyaratan mengenai sumber-sumber yang bertanggung jawab dari konsumen-konsumen utamanya. Akibatnya, Korindo sudah kehilangan dua pelanggan utamanya, Wilmar dan Musim Mas. Keduanya merupakan pembeli langsung kelapa sawit Korindo. Kalau Korindo tetap melanjutkan cara ini, perusahaan ini akan berisiko kehilangan konsumen lainnya, kehilangan investor, kerusakan ekstrim yang tersohor, dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan-tindakannya. Atau, Korindo akan memilih bergabung dengan revolusi dalam bidang pertanian yang bertanggung jawab dan memulai lembaran baru dengan melakukan hal-hal berikut:

- Segera menegakkan moratorium terhadap semua pembukaan dan pembakaran hutan yang baru;
- Mengadopsi dan segera mengimplementasikan kebijakan lintas komoditas yang melindungi lansekap dengan stok karbon tinggi (mengikuti Pendekatan Stok Karbon Tinggi yang tersedia di [www.highcarbonstock.org](http://www.highcarbonstock.org)), hutan serta lahan gambut di kedalaman berapapun yang memiliki nilai konservasi tinggi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, masyarakat, dan pekerja. Kebijakan ini harus diberlakukan di seluruh operasi yang dijalankan secara global oleh Korindo, anak perusahaannya, dan mitra-mitra joint venture dan rantai pasokan. Korindo juga harus menerbitkan sebuah perencanaan implementasi melalui kerjasama dengan mitra pelaksana yang terpercaya, menerbitkan laporan kemajuan secara teratur, dan melakukan verifikasi kepatuhan melalui pihak ketiga yang independen.
- Menghentikan semua pengoperasian PT Gelora Mandiri Membangun di Halmahera Selatan (Maluku Utara) dimana Korindo melakukan perambahan ke kawasan adat milik masyarakat lokal;
- Mengarahkan dan memulihkan kerugian lingkungan yang ditinggalkan, penyerobotan lahan dan pelanggaran hak asasi manusia- termasuk mengembalikan kawasan adat, menyelesaikan konflik-konflik dan keluhan-keluhan sosial, serta mengembalikan ekosistem yang rusak. Membiayai restorasi kawasan setidaknya seluas areal yang telah dirusak selama lebih dari dua dasawarsa.
- Menyepakati transparansi yang luas termasuk melepaskan lokasi pabrik pengolahannya dan batas-batas konsesi untuk seluruh komoditas, mengungkapkan nama-nama dan lokasi pemasok dari pihak ketiga, dan memberikan laporan mengenai kepatuhan pemasok dari pihak ketiga secara reguler.
- Tunduk terhadap segala tuntutan hukum terkait dengan penggunaan api untuk membuka lahan oleh Korindo serta perampasan kendali atas kawasan adat tanpa persetujuan masyarakat yang memiliki lahan-lahan tersebut.

Ada banyak sekali yang rentan: 75.000 hektar hutan yang tersisa dalam konsesi Korindo yang sebentar lagi berisiko untuk dihancurkan. Pembakaran Korindo yang akan dimulai pada musim kemarau ini akan mengakibatkan kualitas udara yang membahayakan, mengancam kesehatan orang di seluruh daerah, dan mempengaruhi perubahan iklim secara masif. Warisan budaya Papua dan Maluku Utara yang kaya lama kelamaan akan terkikis jika Korindo tetap memegang kendali dan menghancurkan tanah adat milik masyarakat. Spesies seperti kangguru pohon yang terancam pun akan punah selamanya. Korindo dapat memberikan preseden yang berbahaya mengenai eksploitasi komersial dari salah satu lansekap berhutan yang tersisa ke dalam episentrum global yang pernah mengangkat hutan hujan dan keragaman hayati.

Kita tahu kita dapat menyelamatkan hutan-hutan tersebut dan menghentikan penghancurannya jika ada cukup banyak orang di dunia ini yang menuntut Korindo agar melakukan reformasi dan meminta pemerintah Korea dan Indonesia untuk menahan Korindo agar bertanggung jawab terhadap hal-hal yang melanggar hukum yang dilakukannya. Kunjungi laman kampanye kami untuk melihat lebih banyak foto



dan video tentang penghancuran yang dilakukan Korindo sekaligus untuk melakukan sesuatu di:  
[www.MightyEarth.org/BurningParadise](http://www.MightyEarth.org/BurningParadise).

Terima kasih,

Deborah Lapidus  
Direktur Kampanye  
Mighty

**Foto: Seekor kangguru pohon bersama dengan anak di dalam kantongnya.**



© Mighty / Bustar Maitar; 13 Juli 2016.

**Foto: Pembukaan hutan untuk kelapa sawit di Papua oleh Korindo**



© Mighty; 4 Juni 2016; 6°47'2.69" Lintang Selatan, 140°45'48.58" Bujur Tmur. Kredit: Yerimia Leo.



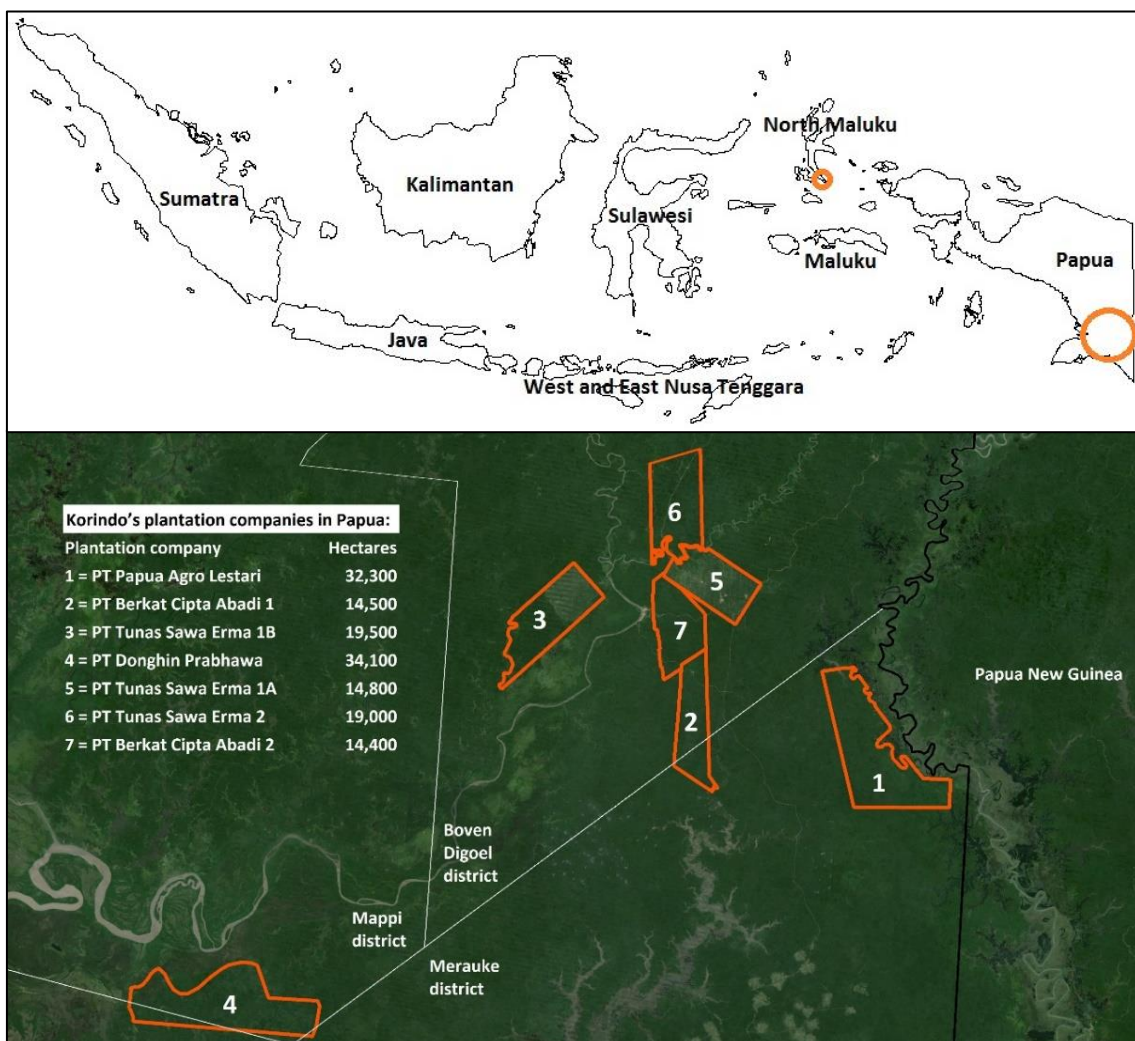
# 1. Bisnis-bisnis kelapa sawit Korindo

## 1.1 Perkebunan

Korindo mempekerjakan sekitar 20.000 orang. Bisnis utamanya adalah sumber daya alam yang operasinya mencakup penebangan kayu, konsesi bubur kayu dan kelapa sawit, serta memproduksi kayu lapis, serpih kayu, dan minyak sawit. Bisnis Korindo lainnya termasuk manufaktur kertas koran, industri-industri berat (termasuk kincir angin), jasa keuangan, dan real estate.<sup>1</sup> Korindo dipimpin oleh keluarga Seung Korea Selatan.

Pengoperasian kelapa sawit Korindo dilakukan di Provinsi Papua dan Maluku Utara di Indonesia. Korindo mulai melakukan operasi penebangan pohon di Papua pada 1993 dan pengembangan kelapa sawit pertama kali pada 1998.<sup>2</sup> Korindo memiliki delapan kawasan dengan luasan total 160.000 hektar. Tujuh kawasan yang berada di Papua seluas 149.000 hektar dengan perusahaan kelapa sawit terbesar Korindo. Perusahaan perkebunan Korindo, PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM), menguasai 11.000 hektar lainnya yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara. Dalam laman Korindo, perusahaan itu menargetkan 200.000 hektar perkebunan kelapa sawit pada 2020.<sup>3</sup>

Gambar 1. Lokasi pengoperasian kelapa sawit Korindo di Indonesia



## Tata batas dan kepemilikan konsesi

Kawasan-kawasan konsesi, baik luasan maupun tata batasnya, yang digunakan dalam laporan ini diambil dari izin pembebasan kawasan hutan dan peta dari pemerintah pusat. Tabel 1 berikut menunjukkan luasan kawasan menurut izin pembebasan kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga diminta untuk mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Hak Guna Usaha (HGU) untuk kawasan konsesi mereka. Izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Dalam banyak kasus, investigasi kami tidak menemukan bukti bahwa izin-izin tersebut pernah dikeluarkan.<sup>4</sup>

**Tabel 1. Izin pembebasan kawasan hutan yang diperoleh Korindo**

Singkatan	Perusahaan perkebunan	Izin pembebasan kawasan hutan	Hektar
PT TSE 1A	PT Tunas Sawa Erma 1A	171/KPTS-II/1998 (27 February 1998)	14.800
PT TSE 1B	PT Tunas Sawa Erma 1B		19.500
PT GMM	PT Gelora Mandiri Membangun	SK.22/MENHUT-II/2009 (29 January 2009)	11.000
PT DP	PT Donghin Prabhawa	SK.623/MENHUT-II/2009 (5 October 2009)	34.100
PT BCA 1	PT Berkat Cipta Abadi 1	SK.328/MENHUT-II/2011 (22 June 2011)	14.500
PT PAL	PT Papua Agro Lestari	SK.52/MENHUT-II/2012 (4 October 2012)	32.300
PT BCA 2	PT Berkat Cipta Abadi 2	SK.835/MENHUT-II/2014 (29 September 2014)	14.400
PT TSE 2	PT Tunas Sawa Erma 2	SK.844/Menhut-II/2014 (29 September 2014)	19.000
<b>Total</b>			<b>159.600</b>

Sumber: Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Kemajuan pembebasan kawasan hutan, Mei 2015, <http://bit.ly/1R5haD5>

## Mitra-mitra dari Korea: Hyosung dan Daewoo

Hyosung Corporation, sebuah konglomerat industri Korea Selatan, merupakan satu-satunya entitas selain Korindo yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan perkebunan milik Korindo. Pada 2014, perusahaan tersebut membeli 15 persen saham di PT Papua Agro Lestari dan PT Gelora Mandiri Membangun. Sejak 31 Desember 2015, perusahaan itu masih mempunyai saham. Hyosung terutama menghasilkan dan menjual produk-produk fiber sintetis dan produk-produk elektronik. Tetapi, Hyosung juga bermain di bisnis konstruksi dan kegiatan-kegiatan bisnis terkait lainnya.<sup>5</sup>

Konglomerat Korea, Daewoo, memiliki konsesi kelapa sawit di kawasan yang sama dengan konsesi kelapa sawit Korindo di Papua. Perusahaan perkebunan milik Daewoo adalah PT Bio Inti Agrindo. Perusahaan ini berlokasi di Kabupaten Merauke. Sesuai izin pembebasan kawasan hutan, luas kawasannya adalah 36.400 hectares.<sup>6</sup> Pada Mei 2016, Daewoo baru saja mengakui bahwa Korindo telah menyarankan Daewoo terkait dengan pengoperasian kawasannya.<sup>7</sup> Daewoo memiliki 85 persen saham di PT BIA. Tidak diketahui siapa pemilik 15 persen saham sisanya di perusahaan tersebut meskipun Korindo mungkin saja menjadi pemilik bayangan.

## Produk-produk Korindo

Kelapa sawit mulai berbuah (Tandan Buah Segar/FFB) setelah kira-kira berumur empat tahun. Hal ini berarti bahwa kelapa sawit sudah ditanam sekitar atau sebelum 2011/2012 agar Korindo dapat memetik panen FFB pada 2015/2016. Inilah yang terjadi pada perusahaan-perusahaan perkebunan Korindo, PT TSE 1A dan PT TSE 1B. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki areal kelapa sawit kira-kira seluas 17.700 hektar yang ditanami sebelum 2010. Kedua perusahaan perkebunan itu mempunyai pabrik pengolahan minyak sawit di dalam wilayahnya yang mengolah panen FFB menjadi Minyak Sawit Mentah (CPO). Total produksi yang dihasilkan kedua pabrik pengolahan ini sekitar 109.000 ton CPO pada kurun waktu Oktober 2014-September 2015. Selain itu, masih ada 23.800 ton biji sawit yang dipanen.<sup>8</sup>

PT Donghin Prabhawa (PT DP) juga mulai memanen FFB dari kelapa sawit yang ditanam pada awal 2011. Tetapi, PT DP belum mempunyai pabrik pengolahan minyak sawit. FFB yang dipanen dikirim ke pabrik pengolahan minyak sawit milik PT TSE. Sementara itu, pabrik pengolahan minyak sawit PT Donghin Prabhawa dan PT Berkas Cipta Abadi sedang dibangun.<sup>9</sup>

## 1.2 Pengantar tentang Papua

Dari semua wilayah di Indonesia, Papua menjadi rumah terbesar bagi hutan hujan tropis primer yang masih perawan. Pada akhir 2012, luas hutan primer diperkirakan 35,2 juta hektar, atau 86,2 persen dari total kawasan. Sebagai bandingan, hutan primer di Sumatera hanya tinggal 13,4 juta hektar yang tersisa, atau 28,3 persen dari luas kawasan. Sementara itu di Kalimantan luasnya 27,6 juta hektar atau 51,9 persen.<sup>10</sup>

Papua menjadi tempat bagi 50 persen keragaman hayati di Indonesia. Di Papua ada sekitar 15.000 – 20.000 tumbuhan (55 persen endemik), 602 burung (52 persen endemik), dan 223 reptil (35 persen endemik). Selain itu, spesies endemik lainnya termasuk kangguru pohon, burung surga, ikan pelangi, kupu-kupu sayap burung, beragam anggrek dan ribuan spesies flora dan fauna lainnya.<sup>11</sup>

Pada 2010, populasi di Papua sekitar 3,6 juta orang. Papua memiliki pertumbuhan populasi terbesar dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia karena tingginya angka kelahiran dan transmigrasi.<sup>12</sup> Papua juga memiliki sekitar 312 suku berbeda termasuk suku-suku terpencil.<sup>13</sup> Situasi acapkali diwarnai ketegangan di kawasan yang memiliki kegiatan-kegiatan baru seperti penanaman kelapa sawit karena kehadiran militer. Kekerasan dan represi yang tak pandang bulu oleh militer terhadap terduga anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua sangat terkenal, dan bahkan sering menyebabkan kepanikan yang meluas di desa-desa.<sup>14</sup>

Kawasan lahan yang luas makin sulit ditemukan di Sumatera dan Kalimantan karena begitu banyaknya kawasan yang sudah terdeforestasi. Hal itu juga disebabkan oleh meningkatnya pelaksanaan pembatasan sektor swasta maupun pemerintah untuk melakukan deforestasi, konversi lahan gambut, dan pengambilalihan tanah-tanah masyarakat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan perkebunan mencari lahan perluasan di Papua. Pada 2005, hanya ada lima perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Papua. Menjelang akhir 2014, ada 21 perkebunan yang beroperasi, dengan 20 konsesi lain pada tahap yang lebih maju atas proses-proses perizinan mereka.<sup>15</sup> Korindo, yang mulai aktif di sektor kehutanan di Papua semenjak 1993, paling agresif melakukan perluasan kawasan kelapa sawitnya di Papua lebih dari lima tahun terakhir. Alhasil, Korindo merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar di Papua.

**Foto: Kangguru pohon**



© Greenpeace / Gerald Cubitt



### 1.3 Pengantar tentang Halmahera Selatan

Anak perusahaan Korindo, PT Gelora Mandiri Membangun, terletak di Kabupaten Halmahera Selatan di Pulau Halmahera, di Maluku Utara. Halmahera merupakan salah satu 'Kepulauan Rempah-rempah' yang asli dan bagian dari ekoregion Wallacea yang memiliki fauna yang sangat unik yang menggambarkan percampuran spesies Asia dan Australasia.<sup>16</sup> Komunitas-komunitas di kawasan itu, yang telah hidup di tempat tersebut selama ratusan tahun, kebanyakan tinggal jauh dari laut dan daratan sehingga hutan menjadi sumber karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin, kayu untuk rumah dan perahu, sekaligus untuk obat-obatan herbal. Mereka juga sangat bergantung pada kebun-kebun lokal dimana mereka dapat menanam buah-buahan, sayuran, ubi rambat, cabai, kelapa, pala, dan cengkeh.<sup>17</sup>

**Gambar 2. Halmahera Selatan pada Mei 2016 (hutan yang dibuka oleh Korindo ada di dalam batas kuning)**



Sumber: Landsat 7 imagery selama 8 Mei sampai 9 Juni 2016.

## 2. Praktik-praktik dan komitmen keberlanjutan

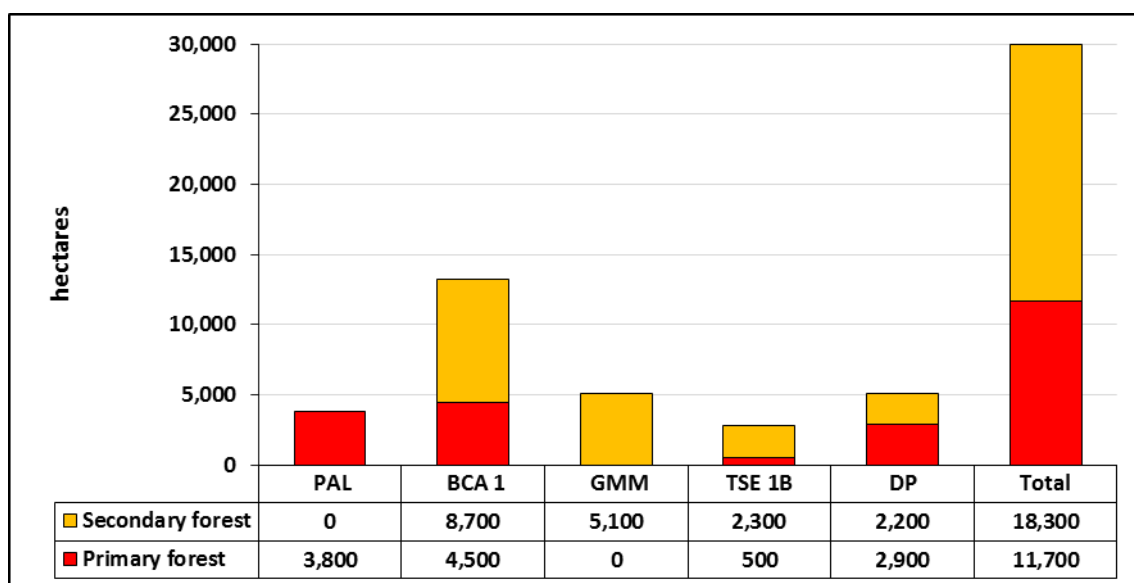
### 2.1 Praktik: deforestasi yang meluas

#### Percepatan pembukaan lahan sejak 2013

Korindo telah mempercepat proses pembukaan dan penanaman di Papua sejak 2013, dan pada 2014 mulai melakukan pembukaan ekstensif di Halmahera Selatan. Gambar 3 menunjukkan hilangnya tutupan hutan dari 2013 sampai akhir Mei 2016 yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- Total deforestasi yang dilakukan oleh Korindo selama periode waktu 2013 sampai Mei 2016 adalah 30.000 hektar yang terdiri dari 11.700 hektar hutan primer dan 18.300 hektar hutan sekunder.
- Pembukaan lahan terhadap hutan primer baru saja dilakukan oleh PT PAL (3.800 hektar sejak akhir 2015) dan PT TSE 1B (500 hektar pada 2016).

Gambar 3. Kawasan yang dibuka hutannya sejak 2013



Sumber: Citra Landsat 8, dibandingkan dengan peta tutupan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2011, dan dalam kasus petat tutupan hutan milik PT DP untuk 2009.

#### Pembukaan sebelum 2013

Korindo mulai menanam kelapa sawit di Papua pada 1998, setelah PT Tunas Sawa Erma menerima izin pelepasan 34.300 hektar kawasan hutan. Menjelang 2000, PT TSE 1A telah menanam kelapa sawit di areal seluas 7.500 hektar. PT TSE 1B mulai pembangunannya pada 2006 dan telah menanami kawasan seluas 7.000 hektar pada 2008.<sup>18</sup> Menjelang 2010, keseluruhan areal yang dikembangkan oleh PT TSE 1A adalah 21.400 hektar.<sup>19</sup> Sebagian besar pengembangan ini mengorbankan hutan primer.<sup>20</sup>

Korindo mulai mengembangkan konsesi PT Donghin Prabhawa (PT DP) pada akhir 2010. Menjeang 2012, sekitar 1.600 hektar kawasan hutan sekunder telah dibuka.

Secara total, Korindo telah membabat lebih dari 50.000 hektar hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kawasan tersebut kira-kira sama luasnya dengan Seoul, ibukota Korea Selatan.

### Kayu di kawasan-kawasan konsesi kelapa sawit

Kayu dari pohon-pohon yang ditebangi oleh Korindo untuk perkebunan kelapa sawit kemungkinan dibawa ke pabrik pengolahan kayu lapis di Asiki. Pendapatan dari kayu bisa jadi menyumbang pembiayaan dengan porsi yang substansial terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada 2014, Pusat Studi Kehutanan Internasional (CIFOR) memperkirakan bahwa sebagian besar dari 22.000 hektar hutan primer yang telah dibabat oleh TSE 1A sebelum 2010 akan menghasilkan pendapatan dari kayu untuk mendukung pembiayaan pengembangan setidaknya 10.000 hektar perkebunan kelapa sawit.<sup>21</sup>

**Foto: Batang kayu yang siap dikirim dari konsesi kelapa sawit PT Papua Agro Lestari milik Korindo**



© Mighty; 4 Juni 2016; 6°45'42.82" Lintang Selatan, 140°48'17.75" Bujur Timur. Kredit: Yerimia Leo

**Foto: Truk Korindo sedang membawa batangan kayu dari konsesi kelapa sawit PT GMM milik Korindo di Maluku Utara**



© Walhi, November 2014.

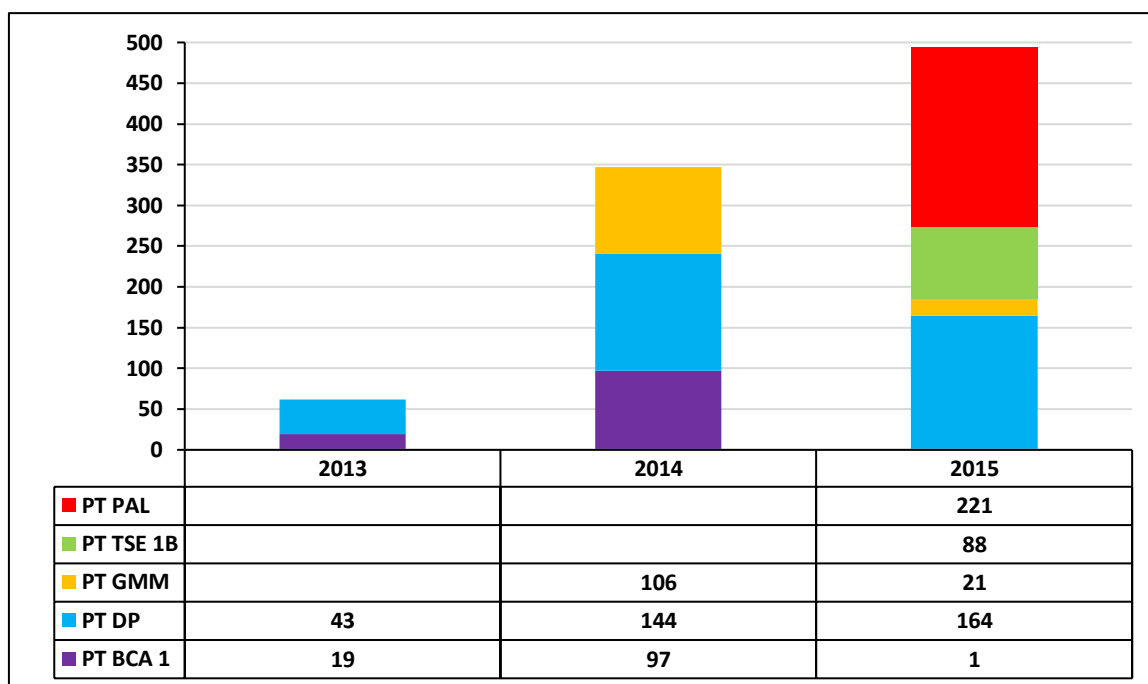


## 2.2 Praktik: penggunaan api secara sistematis untuk membuka lahan

### Penggunaan api secara sistematis oleh Korindo

Semua bukti yang dikumpulkan oleh Aidenvironment mengarah pada penggunaan api secara sistematis oleh Korindo selama proses-proses pembukaan lahan.<sup>22</sup> Selama kurun waktu 2013 sampai 2015, tak kurang dari 894 titik panas (>50 persen keyakinan/confidence) direkam dari tata batas konsesi anak perusahaan Korindo. Pada 2013, Korindo membuka hutan dan lahan di dua kawasan konsesi, tiga konsesi pada 2014, dan empat konsesi pada 2015. Gambar 4 berikut ini menunjukkan korelasi yang jelas antara jumlah konsesi yang dibuka oleh Korindo dan banyaknya titik panas yang terekam.

Gambar 4. Titik panas di dalam tata batas konsesi Korindo, 2013-2015



Sumber: Fire Information for Resource Management System (FIRMS), <http://go.nasa.gov/27awNFg>

Titik panas muncul setelah Korindo membuka hutan dan sebelum perusahaan itu mulai menanam kelapa sawit. Biasanya rangkaian urutan kegiatan yang dilakukan Korindo sambil mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit adalah seperti berikut:

- Pembuatan baris/lining (dengan mengotak-kotakkan blok-blok perkebunan di hutan);
- Penebangan pohon/logging (dengan mengekstrak kayu berkualitas tinggi dari hutan);
- Pembukaan/clearing (menumbangkan pohon hutan dengan ekskavator atau bulldoser);
- Penumpukan barisan kayu (mendorong sisa-sisa kayu, ranting-ranting, dan sebagainya dalam deretan);
- Pembakaran deretan kayu setelah beberapa minggu. Hutan-hutan di Papua memiliki biomasa yang banyak dan api akan mempercepat kerusakan materi ini. Setelah pembakaran yang jelek, Korindo membakar kembali deretan kayu lagi beberapa minggu kemudian; dan
- Penanaman/planting.

Manajemen Korindo yakin bahwa kecil sekali kemungkinan perusahaannya disuruh bertanggung jawab atas pembakaran terbuka melalui sanksi hukum atau sebagai akibat dari opini publik. Kelompok-kelompok masyarakat adat setempat tidak memiliki akses banyak terhadap media untuk melaporkan praktik-praktik ilegal. Apalagi Korindo juga memiliki koneksi yang bagus dengan angkatan bersenjata setempat. Pada Mei 2016, dalam tanggapannya terhadap pertanyaan media berita Korea, SisalN, perwakilan kelompok

Korindo membantah penggunaan api secara strategis dalam proses-proses pembukaan lahan dengan mengatakan, “Perusahaan kami tidak membuat perkebunan melalui pembakaran yang sengaja dilakukan manusia.”<sup>23</sup> Tetapi, perusahaan tidak memiliki bukti untuk memperkuat klaimnya tersebut atau untuk melawan bukti substansial kebalikannya.

### Api dianggap ilegal di Indonesia

Pembakaran untuk membuka hutan dan/atau lahan antara lain dilarang di Indonesia oleh Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Siapapun yang terbukti bersalah melanggar undang-undang ini akan dikenai sanksi termasuk denda dan penjara.<sup>24</sup> Misalnya, pada 11 Agustus 2016 majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis perusahaan Sampoerna Agro untuk membayar Rp. 1,07 triliun (setara dengan 76 juta US dollar) sebagai kompensasi dan restorasi lingkungan karena didakwa telah menyebabkan kebakaran hutan di lahan seluas 3.000 hektar di Provinsi Riau, Sumatera, pada 2014.<sup>25</sup> Selanjutnya, pada September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta memvonis perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam karena melanggar Undang-Undang No. 32/2009. Perusahaan itu didenda untuk membayar Rp366 miliar (kira-kira setara 26 juta US dollar) karena terbukti telah membakar hutan secara ilegal di lahan gambut Tripa, sebagai bagian dari kawasan yang dilindungi Ekosistem Leuser di Sumatera.<sup>26</sup> Undang-undang yang melarang orang untuk melakukan pembakaran dengan sengaja terhadap hutan dan lahan juga dibuat pada 1999 dan 2001.<sup>27</sup>

Pada Oktober 2015, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, berbicara melawan perusahaan-perusahaan “yang mengurangi biaya pembukaan lahan dengan pembakaran.” Ia mengatakan bahwa perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan harus segera ditutup.<sup>28</sup> Tetapi, meskipun telah melanggar hukum, seperti biasanya Korindo tetap dapat lolos dari pembakaran hutan dengan satu eksepsi yang terkenal: Pada November 2015, Korindo menerima izin penundaan selama enam bulan karena kebakaran pada 2015 di salah satu konsesi bubur kayu miliknya, PT Korintiga Hutani, yang berlokasi di Kalimantan Tengah.<sup>29</sup> Menjelang akhir Februari, setelah tiga bulan, menteri memberlakukan kembali izin Korintiga. Telah diputuskan bahwa Korintiga telah memenuhi kewajiban-kewajiban atau peraturannya oleh menteri.<sup>30</sup> Pada Mei 2016, Korindo memberikan pernyataan kepada majalah mingguan Korea, SisaIN, bahwa penundaan itu karena tindakan administratif oleh Pemerintah Indonesia “yang tidak dapat kami pahami.”<sup>31</sup> Pada 2015, ada 72 titik panas di dalam konsesi PT Korintiga Hutani dari 43 titik panas pada 2014.<sup>32</sup>

### Masalah pembakaran di Indonesia

Di sepanjang penghujung 2015, banyak negara di Asia Tenggara menderita akibat tingginya tingkat asap yang diakibatkan oleh kebakaran di Indonesia. Pembukaan lahan untuk kelapa sawit, pulp and paper, dan komoditas-komoditas pertanian lainnya merupakan salah satu alasan utama kebakaran tersebut. Krisis asap menyebabkan jutaan orang menderita penyakit pernapasan, dan Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran itu telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 16 miliar US dollar bagi Indonesia.<sup>33</sup>

Karena kebakaran tersebut, Indonesia menyumbang emisi yang lebih tinggi terhadap perubahan iklim pada 2015 daripada emisi yang dikeluarkan Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Selama berhari-hari selama terjadinya bencana kabut asap, polusi karbon di Indonesia lebih tinggi dari emisi yang dihasilkan oleh seluruh ekonomi Amerika Serikat.<sup>34</sup>

Jumlah keseluruhan titik panas di dalam konsesi-konsesi kelapa sawit, bubur kayu dan penebangan milik Korindo pada 2015 adalah 856 dan 495 diantaranya terjadi di perkebunan kelapa sawit yang sedang melakukan pengembangan. Jumlah total kebakaran yang terdeteksi di Indonesia pada 2015 adalah 122.568.<sup>35</sup> Ini berarti bahwa 0,7 persen dari kebakaran terjadi di kawasan-kawasan konsesi Korindo. Persentase ini cukup tinggi mengingat ratusan perusahaan kelapa sawit dan kehutanan aktif beroperasi di Indonesia. Sektor kelapa sawit dan kehutanan merupakan dua alasan utama terjadinya kebakaran.

Foto: Asap membubung dari deretan kayu yang terbakar di konsesi PT Berkat Cipta Abadi



©Ardiles Rante/Greenpeace; PT Berkat Cipta Abadi (Korindo Group); 26 Maret 2013

Foto: Tumpukan kayu disusun oleh PT Papua Agro Lestari yang siap dibakar?



© Mighty, 4 Juni 2016; 6°45'41.80"Lintang Selatan, 140°48'18.78" Bujur Timur



## 2.3 Praktik: pengingkaran hak masyarakat

### Hak adat

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia tidak konstitusional karena pengklasifikasian atas hutan adat sebagai hutan negara yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka karena hak kepemilikan ada di tangan Negara.<sup>36</sup> Bagi konsesi-konsesi kelapa sawit Korindo, sudah menjadi kelaziman kalau semua konsesi itu berada di kawasan hutan yang mempunyai hak adat dari masyarakat adat yang telah dilepaskan oleh pemerintah pusat kepada Korindo seakan-akan kawasan itu milik mereka. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa kawasan hutan ada tersebut milik masyarakat adat. Dengan demikian, legalitas konsesi-konsesi kelapa sawit Korindo sangat dipertanyakan.

Konsesi PT Gelora Mandiri Membangun milik Korindo menduduki lahan pertanian dan hutan milik masyarakat di Halmahera Selatan di Maluku Utara. Sebagian besar masyarakat, yang telah tinggal di sana selama beratus-ratus tahun, sangat menentang keberadaan perkebunan kelapa sawit. Korindo tidak mengindahkan hak-hak adat mereka dan justru tetap melanjutkan usahanya di sana. Kasus ini dijelaskan secara lebih rinci pada Bagian 4.1.

**Foto: Tulisan di sebuah rumah di desa Gane Dalam mengatakan agar PT GMM (Korindo) segera pergi.**



© Rainforest Action Network, Mei 2016.

Di Papua, Korindo selalu kelihatan sudah membuat kesepakatan dengan para pemilik hutan adat. Tetapi ini tidak berarti bahwa Korindo telah mengakui hak para masyarakat lokal untuk memberikan atau menolak Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) terhadap semua pembangunan di lahan milik komunitas:

- Dalam kasus PT Dongin Prabhawa, sebuah kesepakatan telah dibuat pada 2012 setelah Korindo memulai operasi kelapa sawitnya pada akhir 2010. Meskipun sudah ada kesepakatan, masyarakat Ngguti asli menyesalkan bahwa hutan dan rawa dimana mereka biasa berburu dan mencari makan kini telah hilang.<sup>37</sup>

- Dalam kasus PT Tunas Sawa Erma 1A (PT TSE 1A) milik Korindo, ada 11 klan yang memiliki lahan tradisional seluas lebih dari 7.000 hektar telah menyepakati pengembangan kelapa sawit pada 2005, tetapi kemudian menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberi pemberitahuan secara layak.<sup>38</sup>
- 25 klan yang memiliki lebih dari 12.000 hektar dalam areal konsesi PT TSE 1A menolak proposal perkebunan pada 2006. Korindo menghormati penolakan mereka,<sup>39</sup> tetapi pada 2015, pembangunan dimulai dari areal konsesi ini, yang kelihatannya karena berdasarkan persetujuan dengan para pemilik lahan.

### Masalah-masalah sosial di Papua

Hanya ada sedikit informasi yang diketahui oleh publik baik tentang kesulitan yang dialami oleh para buruh perkebunan maupun tentang orang yang tinggal berdekatan dengan konsesi-konsesi Korindo di Papua. Inilah yang kita tahu dari informasi yang tersedia:

- LSM Papua Yayasan Pusaka melaporkan pada Juni 2016 PT TSE 1A mengancam akan memecat tiga pekerja. Ketiga pekerja itu mengadakan demonstrasi bersama dengan ratusan pekerja asli dari Papua di depan kantor PT TSE 1A pada Mei 2016. Para pekerja itu memprotes perusahaan karena kurang memperhatikan pada karir, pembangunan kapasitas, dan peningkatan pengetahuan teknologi kepada para pekerja asli Papua. Tampaknya Korindo tidak menerima protes dan tuntutan para pekerja.<sup>40</sup> Pada 2010, hanya 13 persen dari 3.400 orang yang dipekerjakan PT TSE 1A dan 1B berasal dari orang Papua asli. Sebagian besar pekerja adalah migran dari daerah-daerah lain di Indonesia.<sup>41</sup>
- Pada Januari/Februari 2014, organisasi Indonesia JPIC MSC Indonesia mengadakan investigasi di lapangan terhadap konsesi PT Dongin Prabhawa. Mereka menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan dan oleh polisi dan militer yang bertugas di areal kerja perusahaan. Para pekerja dan buruh lepas tidak punya akses untuk air minum, bahan tidak menerima makan dari PT Dongin Prabhawa selama tiga bulan. Aparat polisi terlibat dalam penjualan minuman keras sitaan dan perjudian. Pada 2013, seorang pekerja PT Dongin Prabhawa ditangkap dan diduga disiksa oleh seorang anggota angkatan bersenjata. LSM berbasis di Inggris, Business & Human Rights Resource Centre, mengundang Korindo untuk memberikan tanggapan terhadap dugaan tersebut, tetapi tidak ada respon yang diterima.<sup>42</sup>
- Pada April 2010, Center for International Forestry Research (CIFOR) mewawancarai 97 pekerja, para pemilik tanah adat, dan orang yang tinggal di dekat perkebunan milik PT TSE 1A dan 1B. Semua responden dari ketiga kelompok itu mengatakan bahwa perkebunan telah mengurangi pendapatan mereka dari produk hutan dan mengurangi kemampuan mereka untuk mencari kayu bakar dan untuk bangunan rumah. Secara khusus para pemilik tanah mengakui kurangnya akses untuk mencari makan dan pendapatan dari sumber daya hutan. Mereka yang dulunya terbiasa mandiri, kini menjadi ketergantungan terhadap bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Lebih dari 60 persen pemilik tanah dan orang yang berada di dekat perkebunan-perkebunan tersebut melaporkan turunnya kualitas air. Kedua kelompok menggunakan air sungai dan danau untuk minum, mandi, dan mencari ikan.<sup>43</sup>

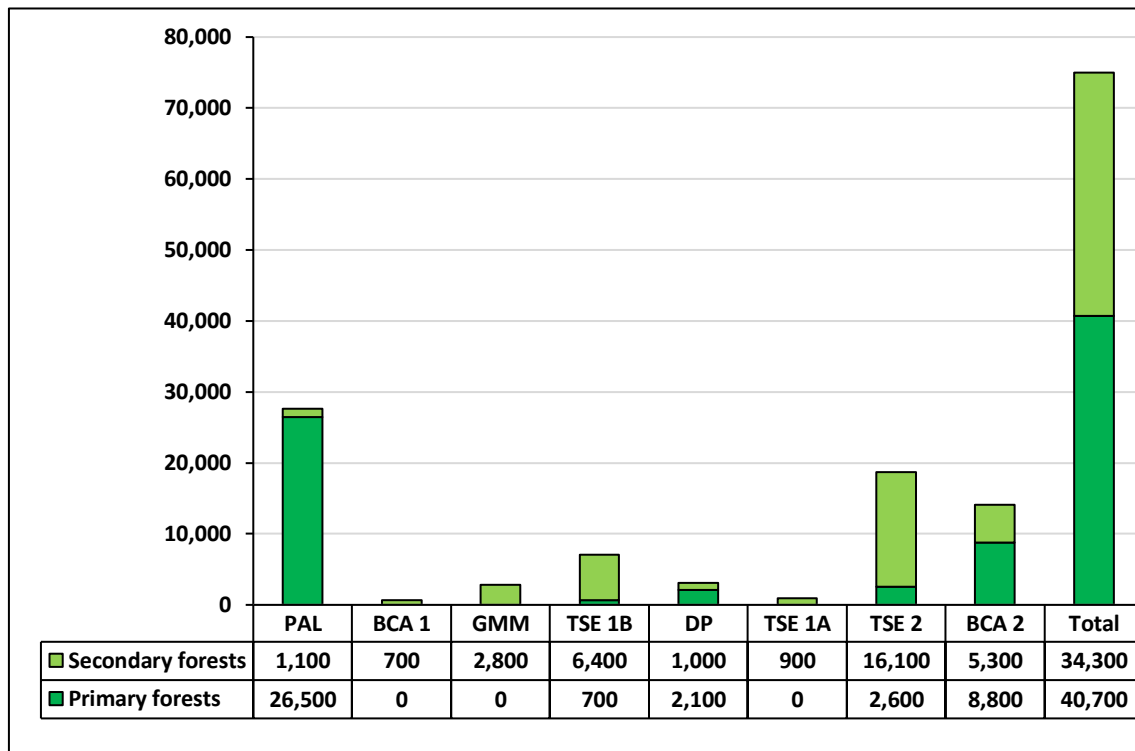
## 2.4 Hutan yang berisiko untuk dibabat

Saat ini, 75.000 hektar hutan masih berada di dalam konsesi Korindo. Hutan-hutan tersebut sangat berisiko untuk dibabat. Empat perkebunan yang sedang dikembangkan Korindo saat ini (PT PAL, PT GMM, PT TSE 1B dan PT DP) masih memiliki 29.300 hektar hutan primer dan 11.300 hektar hutan sekunder.

Sudah menjadi praktik umum di kalangan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk mengidentifikasi dan menjaga kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) di dalam areal konsesi mereka. Para penandatanganan kebijakan-kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (No Deforestation) bahkan sudah berada selangkah lebih maju, yaitu dengan mengidentifikasi dan menjaga kawasan dengan Stok Karbon Tinggi (HSC). Sejauh ini, Korindo hanya menunjukkan upaya kecil atau bahkan tidak melakukan upaya sama sekali untuk menjaga kawasan-kawasan signifikan manapun di dalam konsesi-konsesi mereka. Kawasan-kawasan yang telah dikembangkannya sampai detik ini telah dibabat habis kecuali sungai penyangga atau sebidang tanah hutan yang kecil.

Korindo bahkan belum juga mengembangkan konsesi PT TSE 2 dan PT BCA 2. Kawasan-kawasan tersebut sekarang memiliki 11.400 hektar hutan primer dan 21.400 hektar hutan sekunder.

**Gambar 5. Hutan berisiko yang tersisa di konsesi Korindo dari Mei 2016 (hektar)**



Sumber: Citra Landsat 8, dibandingkan dengan peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 2011, dan dalam kasus peta tutupan hutan PT DP untuk 2009

## 2.5 Komitmen

### Tidak ada kebijakan keberlanjutan untuk kelapa sawit

Korindo tidak pernah mempublikasikan kebijakan-kebijakan keberlanjutan secara spesifik terkait dengan pengoperasian kehutanan dan kelapa sawit yang dijalankannya. Korindo juga bukan salah satu dari 2.800 anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).<sup>44</sup>



Dalam laman Korindo, Pemimpin Grup Korindo, Seung Eun-ho, mengatakan, “KORINDO Group menjangkau dunia untuk menekankan peranannya sebagai sebuah perusahaan yang ramah lingkungan.”<sup>45</sup> Perusahaan itu juga menayangkan sebuah video promosi di lamannya yang menggambarkan perusahaannya sedang memastikan sebuah ‘masa depan hijau’.<sup>46</sup> Pada 2015, perusahaan itu juga terlibat dalam sejumlah proyek lingkungan seperti misalnya pembersihan Sungai Ciliqing melalui Kota Bogor di Jawa Barat, memberikan bantuan 50.000 semaian bibit ke Timor Timur, dan mendonasikan Rp1 miliar (setara 74.000 US dollar) untuk sebuah organisasi lingkungan, Paguyuban Budiasi, untuk beragam kegiatan.<sup>47</sup> Korindo juga baru saja membangun sebuah klinik kesehatan di Asiki, Papua.<sup>48</sup> Tetapi, tindakan-tindakan tersebut tidak dapat menggantikan kenyataan bahwa kebijakan tentang keberlanjutan atau dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan hak asasi manusia yang timbul akibat pengoperasian Korindo itu tidak ada.

### **Pelanggan utama dengan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation (No Deforestation)***

Wilmar and Musim Mas, yang menjadi pembeli langsung kelapa sawit dari Korindo, telah mengadopsi kebijakan-kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (yang selanjutnya disebut kebijakan *No Deforestation/Tidak Boleh Ada Deforestasi*). Wilmar, sebagai pedagang kelapa sawit terbesar di dunia, menjadi yang pertama yang mengumumkan kebijakan itu pada Desember 2013.<sup>49</sup> Musim Mas kemudian mengadopsi kebijakan itu pada Desember 2014.<sup>50</sup> Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi kebijakan-kebijakan *No Deforestation* berkomitmen sendiri untuk melakukan hal-hal seperti berikut:

- Mengakhiri semua deforestasi dan menjaga kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) (dengan menggunakan pendekatan Stok Karbon Tinggi);
- Melindungi seluruh lahan gambut (tidak memandang kedalamannya);
- Mengakui hak masyarakat lokal untuk memberikan atau menolak Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) terhadap setiap pengembangan yang baru;
- Menaati konvensi-konvensi mendasar dari International Labour Organisation (ILO)<sup>51</sup> dan menjunjung tinggi Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights).<sup>52</sup>

Kebijakan-kebijakan itu berlaku untuk setiap pengoperasian perkebunan dan para pemasok dari pihak ketiga milik pihak yang menandatangani kebijakan. Ketika ada pemasok yang ternyata tidak patuh, maka tim-tim pengadaan dan keberlanjutan dari para pedagang itu biasanya akan mendekati pemasok tersebut dan menjelaskan tujuan dan dampak dari kebijakan *No Deforestation* tersebut. Jika pemasok ternyata sedang mengembangkan lahan di kawasan-kawasan yang bermasalah (hutan, gambut, dalam konflik), maka biasanya akan dikeluarkan “surat perintah penghentian kerja” sampai kajian-kajian (tentang HCV, HCS) yang relevan selesai dilakukan dan/atau konflik-konfliknya terselesaikan. Kelompok-kelompok pemasok yang tidak dapat menegakkan aturan “surat perintah penghentian kerja” ini akan berisiko menghadapi penghentian atau penundaan dari para penandatanganan kebijakan *No Deforestation* terhadap perdagangan yang dilakukannya. Seperti yang dirinci dalam laporan berikut, perusahaan-perusahaan Korindo telah berulang kali dan dengan kasar melanggar kebijakan-kebijakan *No Deforestation* yang diterapkan oleh Wilmar dan Musim Mas. Padahal kedua perusahaan tersebut telah memperingatkan berkali-kali agar Korindo mengubah praktik-praktik yang dijalankannya. Akibatnya Korindo telah kehilangan Wilmar dan Musim Mas sebagai pelanggannya dan ini kemudian akan berdampak serius terhadap pendapatan bersih Korindo.

Belasan perusahaan lainnya di seputar rantai pasokan kelapa sawit telah mengadopsi kebijakan-kebijakan konservasi yang tegas termasuk diantaranya adalah pedagang-pedagang besar Apical Group<sup>53</sup>, Golden Agri-Resources<sup>54</sup> dan ADM<sup>55</sup>. Hal ini juga berlaku bagi para produsen utama seperti Astra Agro Lestari, First Resources, dan Bumitama. Bersama itu pula para penandatanganan kebijakan *No Deforestation* telah mencakup sebagian besar pasar kelapa sawit yang diperdagangkan secara global.<sup>56</sup> Langkah yang diambil

untuk memastikan kepatuhan para pemasok merupakan faktor penting yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diadopsi tersebut memang berdampak besar di tingkat bawah.

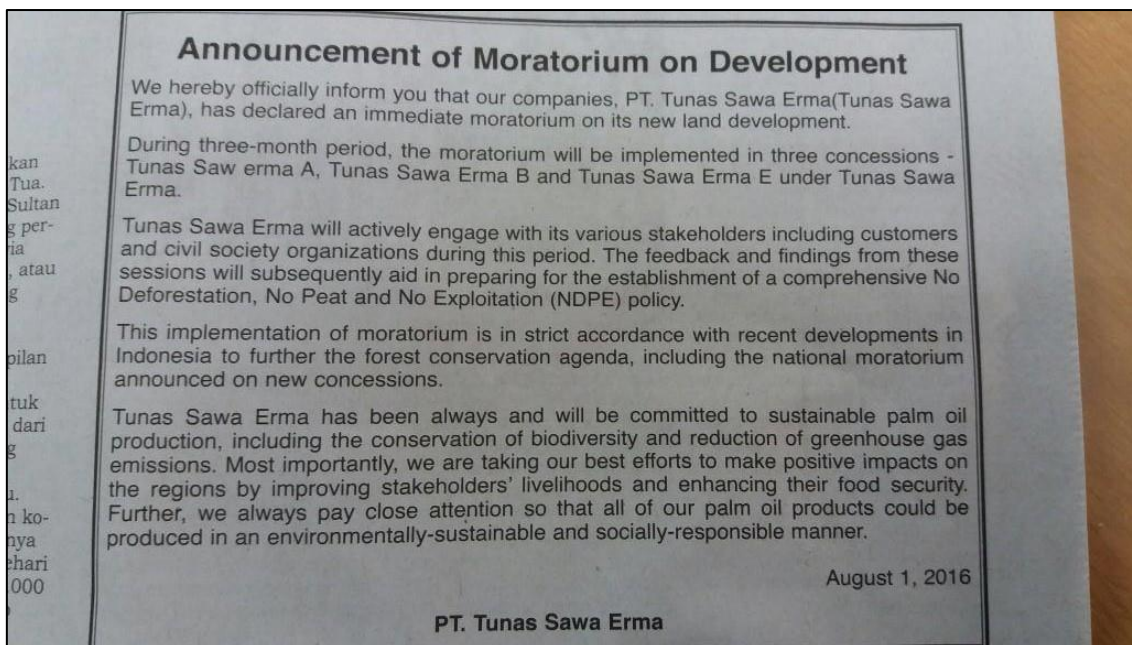
#### PT Tunas Sawa Erma (PT TSE) mengumumkan moratorium

Baru-baru ini setelah Musim Mas<sup>57</sup> dan Wilmar berkomitmen untuk masalah keberlanjutan, anak perusahaan Korindo, PT Tunas Sawa Erma (PT TSE) menyatakan moratorium tiga bulan terhadap pengembangan lahan baru. PT TSE mengumumkan moratorium ini di sebuah koran daerah pada 9 Agustus 2016 (lihat foto berikut). Selama tiga bulan, PT TSE berencana untuk membangun kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation yang komprehensif serta mengadakan pelibatan para pemangku kepentingan.

PT TSE mengendalikan tiga perkebunan, PT TSE 1A yang sudah ditanami dengan kelapa sawit, PT TSE 1B yang sedang melakukan pembukaan lahan pada 2016, dan PT TSE 2 yang belum memulai pembangunan. Dari Mei 2016, hutan seluas sekitar 25.000 hektar masih tersisa di perkebunan PT TSE 1B dan PT TSE 2. Kebijakan No Deforestation yang diusung PT TSE ini akan memberikan manfaat signifikan terhadap ekologi dan masyarakat jika dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit yang telah dikembangkan Korindo sebelumnya.

Anak perusahaan Korindo lainnya, PT GMM dan PT PAL, saat ini juga sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Tetapi, Korindo belum mengumumkan moratorium dan kebijakan No Deforestation terhadap kedua perusahaan tersebut. Barangkali hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 15 persen saham kedua perusahaan perkebunan tersebut dimiliki oleh perusahaan Korea, Hyosung. Lain halnya dengan PT TSE yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh Korindo. Korindo juga belum mengumumkan kebijakan No Deforestation terhadap usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kayu.

#### Foto: Pengumuman PT TSE di sebuah koran daerah pada 9 Agustus 2016.



### 3. (Mantan) Pelanggan kelapa sawit Korindo

#### Transparansi rantai pasokan

Enam pengolah/pedagang minyak kelapa sawit global yang utama telah berkomitmen terhadap transparansi rantai pasokan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah membuka informasi kepada publik terkait dengan pabrik pengolahan yang mengambil sumber minyak kelapa sawit (Minyak Sawit Mentah/CPO dan/atau Biji Sawit) dari mana saja. Dari informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tampaklah bahwa ada empat pedagang/pengolah besar minyak sawit, yaitu Wilmar, Musim Mas, ADM, and IOI, baru-baru ini mengambil sumber pasokan minyak sawit dari Korindo. Akan tetapi, Wilmar dan Musim Mas sudah tidak mengambil lagi sumber minyak sawit dari Korindo sejak Juli/Agustus 2016. IOI dan ADM tidak mengambil sumber pasokan langsung dari Korindo dan telah membeli minyak sawit Korindo dari Wilmar dan/atau Musim Mas. Saat ini tidak jelas Korindo menjual minyak sawitnya ke perusahaan mana saja.

**Tabel 2. Mantan-mantan pelanggan Minyak Sawit Papua milik Korindo yang diketahui**

Pengolah	Unit Pengolah	Lokasi unit pengolah	Periode perusahaan mengungkapkan rantai pasokan
Musim Mas <sup>58</sup>	PT AMR, Bitung PT AMR, Madidir	Sulawesi Utara, Indonesia	2015
Wilmar <sup>59</sup>	PT MNS, Bitung PT WINA, Gresik PT SAP, Palembang	Sulawesi Utara, Indonesia Jawa Timur, Indonesia Sumatra Selatan, Indonesia	Januari - Des 2015
ADM (secara tidak langsung) <sup>60</sup>	ADM Europe, SIO ADM North America (all facilities) ADM Europe, Czernin ADM Europe, Noblee ADM Europe, Purfleet	Perancis Amerika Utara Polandia Jerman Inggris	Juli 2015 – Sept 2015
IOI Loders Croklaan (secara tidak langsung) <sup>61</sup>	Channahon Rexdale Rotterdam Wormerveer	AS Kanada Netherlands Netherlands	1Q 2016

#### Kemana produk Korindo berakhir?

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa produk Korindo berakhir di pasar Eropa dan Amerika Utara melalui ADM dan IOI Loders Croklaan. Disamping itu, penyulingan-penyulingan di negara-negara berikut mengambil sumber bahan bakunya dari unit-unit pengolahan milik Wilmar, yaitu PT MNS, PT WINA dan PT SAP: China dan India (keduanya berada di lokasi yang beragam), Netherlands (Rotterdam dan Rozenburg), Jerman (Brake) dan Amerika Serikat (Stockton).<sup>62</sup> Secara umum, sampai sekarang konsumen akhir dari minyak sawit Korindo dapat ditemukan setidaknya di Eropa, Amerika Utara, China, dan India.

## 4. Isu-isu tiap perusahaan perkebunan

### 4.1 PT Gelora Mandiri Membangun

#### Masalah sosial

PT GMM milik Korindo tidak berhasil mengakui hak-hak masyarakat lokal untuk memberikan atau menolak Persetujuan Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) mereka dalam setiap pengembangan baru di tanah-tanah masyarakat. Dari awal dimulainya proyek, masyarakat-masyarakat tidak diberi informasi yang layak. Pada Januari 2012, warga berdemonstrasi untuk menuntut penutupan operasi PT GMM. Pada pertengahan 2013, konflik pun meningkat dengan penangkapan/kriminalisasi atas 13 warga dari Desa Gane Dalam dan Sekely oleh polisi Halmahera Selatan karena konflik lahan dengan PT GMM. Warga pun mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia karena penahanan 13 warga desa. Situasi ini mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan. Komnas HAM pun mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa saat membuat investasi, pemerintah dan perusahaan harus mempertimbangkan kehidupan masyarakat adat yang hidupnya sangat tergantung kepada sumber-sumber daya alam. Komnas HAM lebih lanjut menyatakan bahwa pelaporan ke-13 penduduk desa kepada kepolisian telah menjadi dampak negatif dari komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, sehingga secara umum kehadiran perusahaan telah menyebabkan masyarakat merasa tidak aman dan terganggu kehidupannya.<sup>63</sup>

Pada Februari 2016, konflik antara warga desa dan perusahaan kembali terjadi. Perusahaan mengusir orang-orang dari lahan pertanian mereka yang produktif, dan mengancam mereka yang menolak untuk pergi. Perusahaan juga menekan orang-orang untuk menyerahkan tanah mereka dengan harga yang ditetapkan perusahaan.<sup>64</sup>

Pada 11 Mei 2016, LSM lingkungan Walhi cabang Maluku Utara mengumumkan bahwa Korindo akan dituntut karena sejumlah masalah, termasuk diantaranya pembatasan akses air bersih untuk masyarakat, tidak memenuhi prosedur-prosedur Analisa Dampak Lingkungan (EIA), perusahaan tidak mempunyai izin Hak Guna Usaha (HGU), penanaman kelapa sawit di lereng curam, pembakaran, dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat.<sup>65</sup>

Pada Mei 2016, penduduk dari desa-desa Gane Dalam, Jibubu, Pasipalele, Sekely, dan Gane Luar mengajukan sebuah surat resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menolak proyek dan meminta agar Kepala BPN tidak menerbitkan izin HGU.<sup>66</sup> Pada 5 Agustus 2016 Korindo mulai menebangi kayu di kawasan sepanjang Sungai Dukolo meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan masyarakat Gane Luar untuk tidak melakukan penebangan. Kesepakatan itu dibuat pada April 2015 yang disaksikan oleh aparat kepolisian. Sungai itu merupakan sumber air bersih bagi masyarakat setempat.<sup>67</sup>

#### Titik panas dan deforestasi

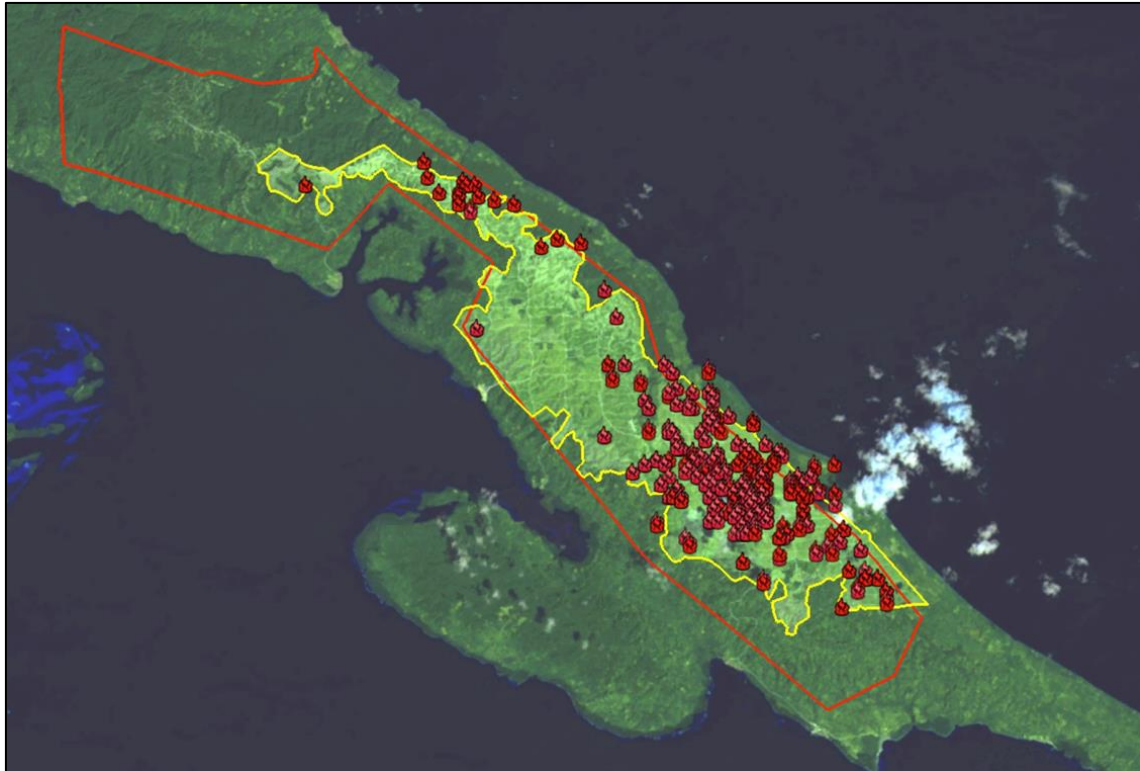
Pada awal Desember 2015, PT GMM telah membuka 5.200 hektar lahan. Pembukaan lahan itu berlanjut hingga 2016 yang meningkat sampai 6.100 hektar pada akhir April.<sup>68</sup> Kawasan hutan sekunder yang habis karena pembabatan itu seluas 5.100 hektar.

Di kawasan tersebut ada banyak kebakaran dan ini menunjukkan sebuah risiko serius karena Korindo telah melanggar undang-undang di Indonesia tentang pembakaran. Ada sekitar 127 titik panas yang dicatat pada 2014 dan 2015 (104 titik panas pada 2014 dan 21 pada 2015). Padahal pada 2013, sebelum Korindo mengembangkan lahan, tidak ada titik panas di sana. Pada September 2015, kebakaran yang berada di dalam konsesi Korindo merambat ke lahan pertanian milik penduduk Desa Sekely. Perusahaan tidak melakukan tindakan apapun. Sebaliknya, perusahaan justru menuduh warga telah melaporkan



kebakaran yang kebetulan terjadi di lahan mereka.<sup>69</sup> Pada Mei 2016, Tom Picken dari NGO Rainforest Action Network yang berbasis di Amerika, mengadakan investigasi lapangan di kawasan konsesi itu. Dia menyatakan bahwa “Banyak warga desa mengakui bahwa Grup Korindo telah memperluas perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan api.”<sup>70</sup>

**Gambar 6. Titik panas pada 2014 dan 2015 di kawasan yang dibuka oleh PT GMM**



Sumber: Citra Landsat 8: 3 sampai 11 Desember 2015. FIRMS, <http://go.nasa.gov/27awNFg>

**Foto: Hutan yang telah dibabat dan asap di wilayah konsesi PT GMM milik Korindo**



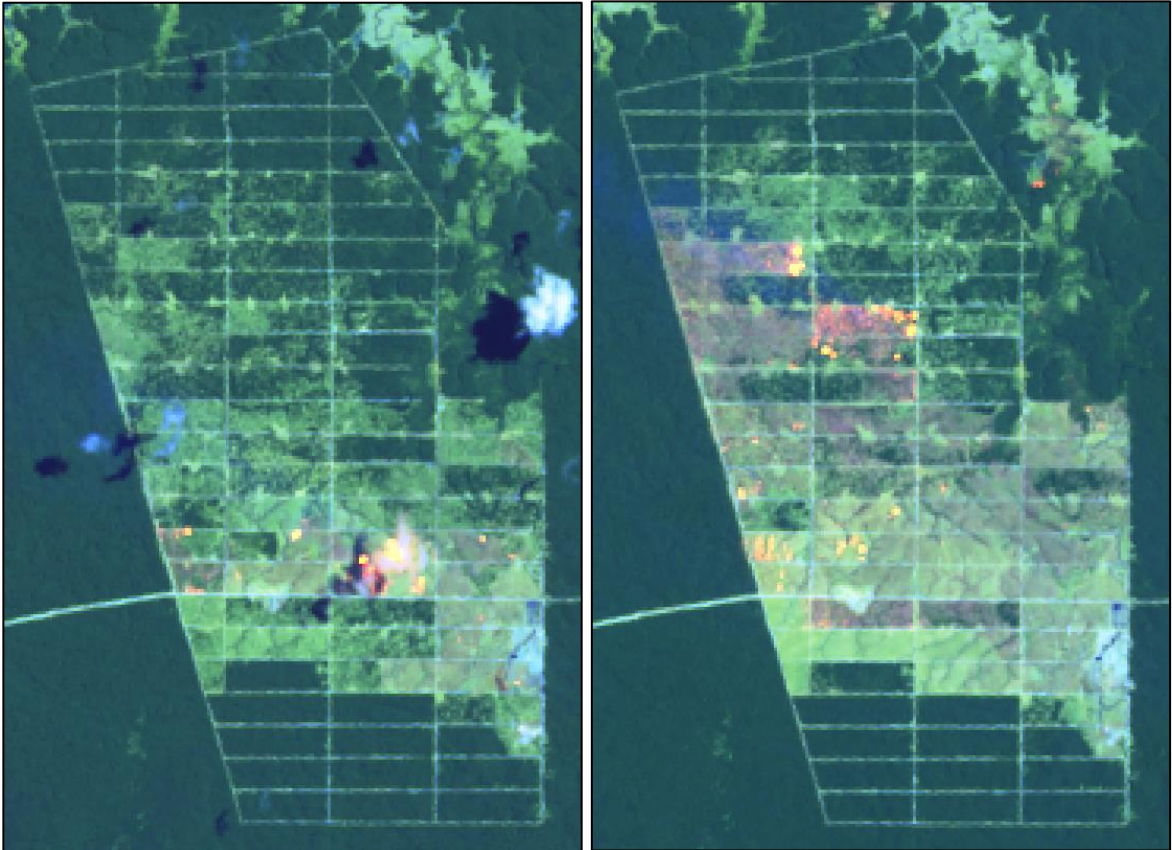
© Walhi. November 2014

## 4.2 PT Papua Agro Lestari

### Pembukaan hutan primer pada 2015

Pengembangan tanah oleh PT Papua Agro Lestari (PT PAL) dimulai setelah April 2015. Areal konsesinya seluas 32.300 hektar dimana 94 persennya merupakan hutan primer. Menjelang akhir 2015, sekitar 2.600 hektar hutan primer sudah habis dibabat.<sup>71</sup> Pembukaan lahan itu dibarengi dengan pembakaran karena terbukti ada 221 titik panas secara keseluruhan yang tercatat antara Agustus dan November 2015. Sebelum pengembangan tanah, pada 2013 dan 2014, tidak ada titik api yang ditemukan di sana.

### Gambar 7. Kebakaran melanda konsesi PT Papua Agro Lestari pada September 2015



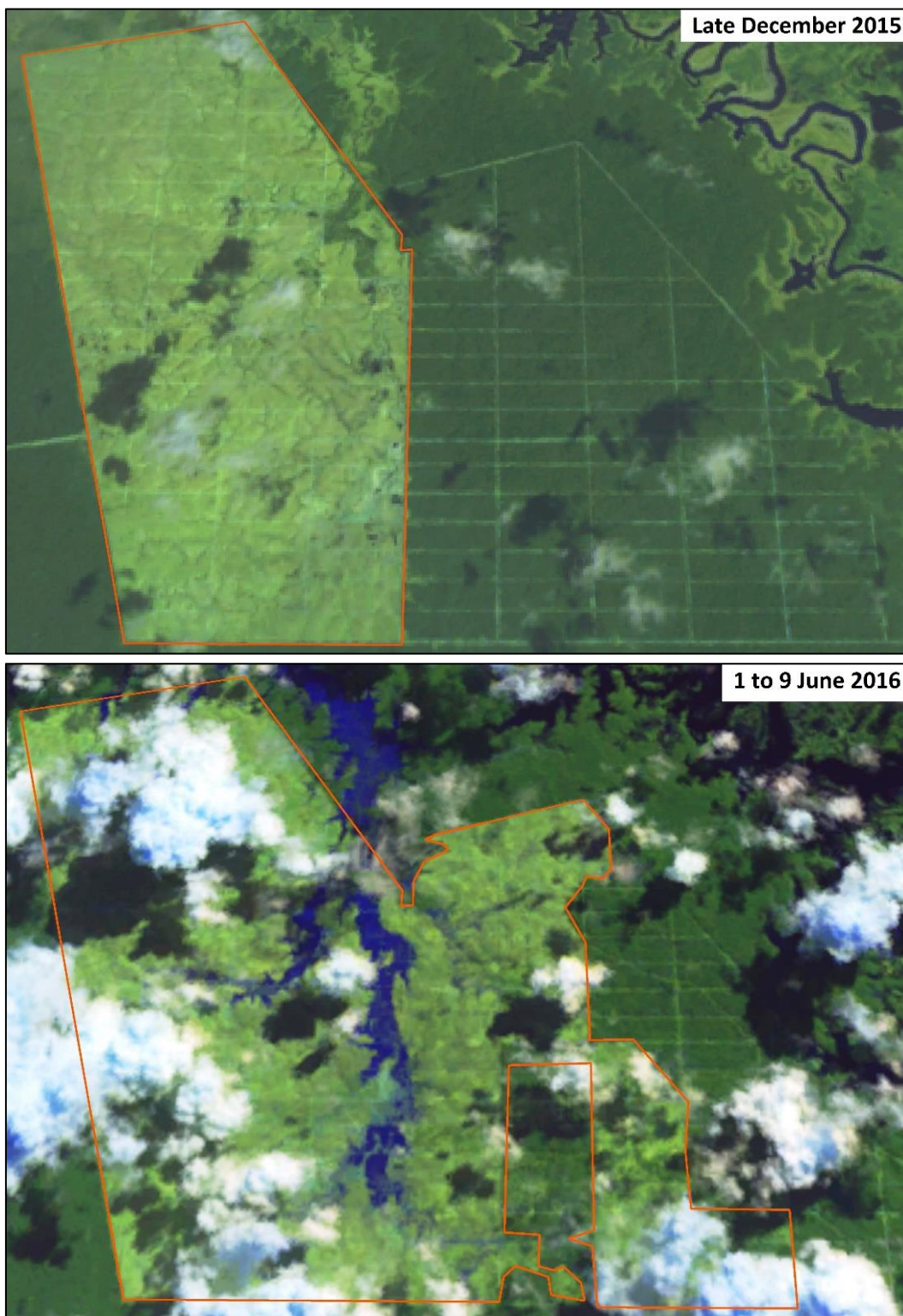
Sumber: Gambar kiri, Citra Landsat 8, 6 sampai 14 September 2015. Gambar kanan, Citra Landsat 8, 22 sampai 30 September 2015

### Pembukaan lahan berlanjut pada 2016

Menjelang akhir Desember 2015, PT PAL telah membagi-bagi blok perkebunan di kawasan 2.300 hektar hutan primer di sebelah timur areal yang telah dibuka sebagai bagian dari persiapan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada minggu pertama Juni 2016, sekitar 1.200 hektar hutan primer telah dibabat di dalam blok-blok perkebunan yang baru.<sup>72</sup> Citra satelit di bawah ini dari Juni 2016 juga menunjukkan penyangga sisi sungai di sekitar areal banjir. Ini berarti tidak ada analisa yang layak terhadap kawasan-kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV).



Gambar 8. Pembukaan lahan berlanjut pada 2016 (kawasan yang dibuka ditandai warna orange)



Sumber: Citra Landsat 8

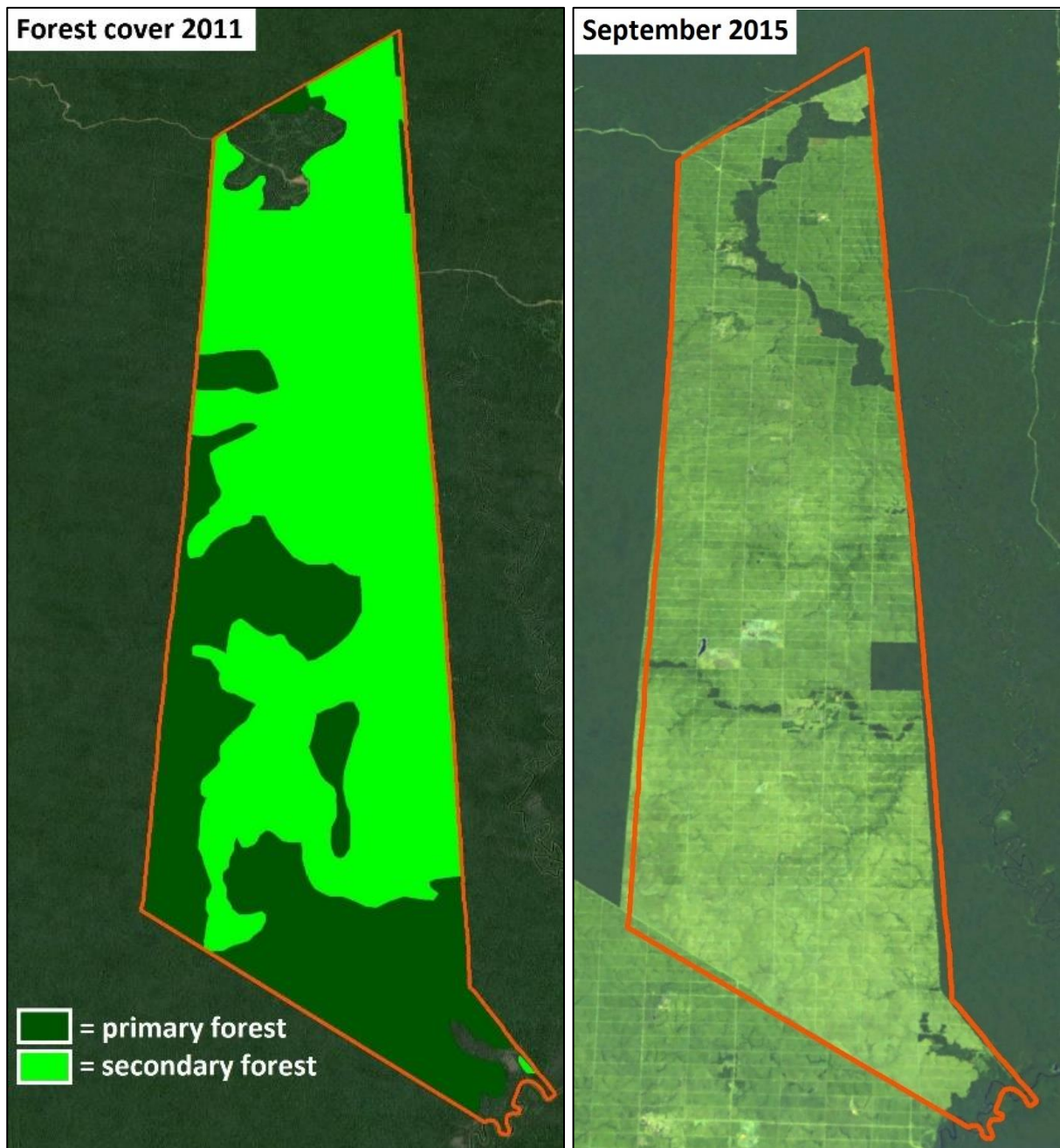


### 4.3 PT Berkat Cipta Abadi 1

#### Hilangnya hutan

Seluruh kawasan konsesi PT BCA 1 adalah daerah berhutan sebelum Korindo memulai operasi kelapa sawitnya. Selama 2013 dan 2014, total ada 4.500 hektar hutan primer yang dibabat habis termasuk juga 8.700 hektar hutan sekunder. Yang disisakan hanya koridor sungai seluas 700 hektar seperti terlihat pada Gambar 9 berikut ini.

Gambar 9. Hutan yang hilang oleh PT BCA 1 pada 2013 dan 2014

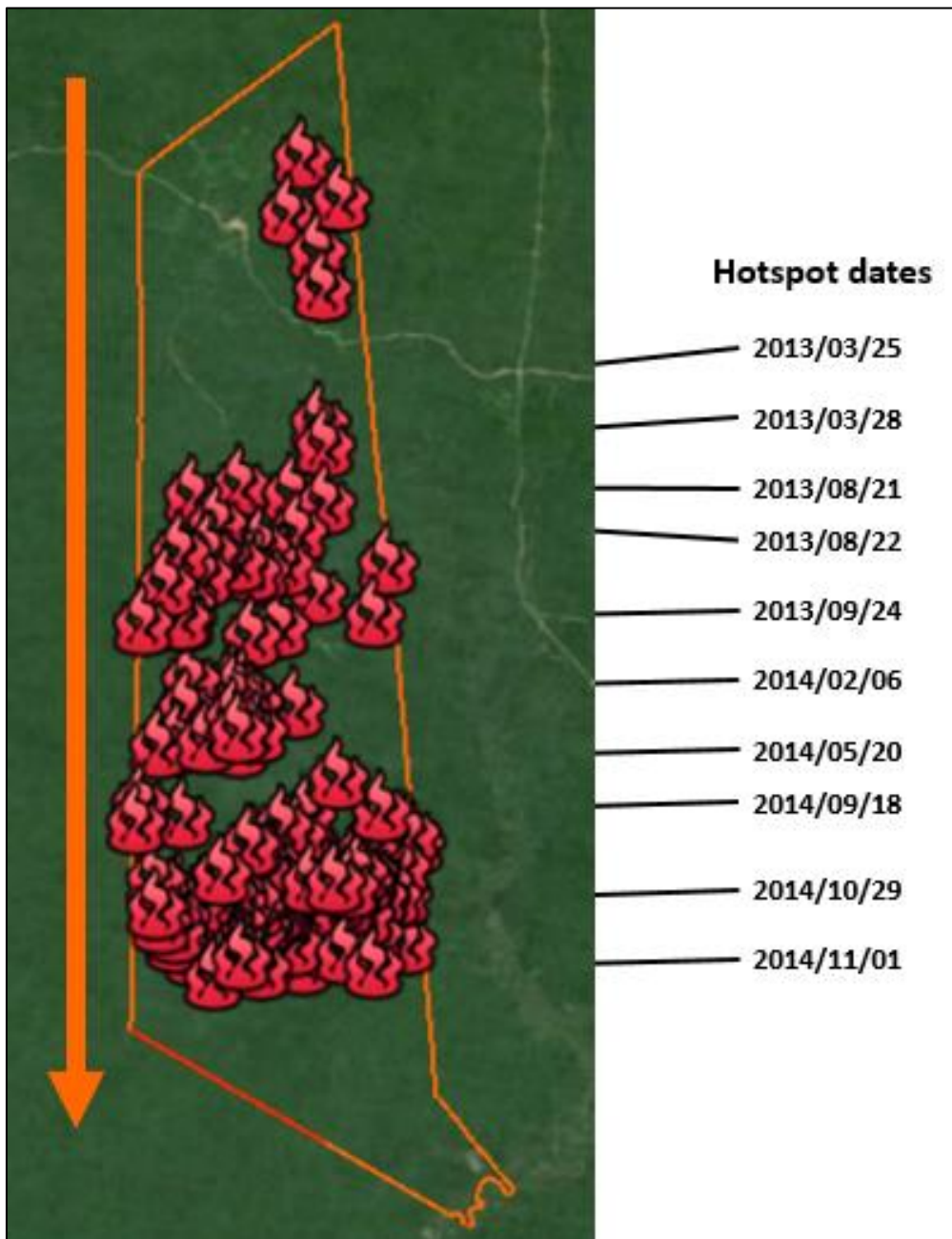


Sumber: Peta tutupan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 2011; Citra Landsat 8 selama 22 sampai 30 September 2015.

### Pola titik panas

Pembabatan hutan dan penanaman kelapa sawit terjadi pada 2013 dan 2014 di dalam wilayah konsesi PT Berkat Cipta Abadi 1 (PT BCA 1). Pengembangan lahan dimulai dari utara dan berakhir di bagian selatan. Titik panas mengikuti deforestasi dan seiring dengan pengembangan lahan. Secara keseluruhan ada 106 titik panas yang terekam pada 2013 dan 2014 (19 titik panas pada 2013 dan 97 pada 2014). Pada 2015, setelah lahan benar-benar dikembangkan, hanya ada satu titik api yang terekam.<sup>73</sup> Dalam sebuah surat tertanggal 22 Juni 2011, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia secara khusus melarang PT BCA melakukan pembakaran sisa kayu ketika melepaskan kawasan hutan tersebut pada PT BCA 1 tahun tersebut.<sup>74</sup> Bagaimanapun juga, pembakaran akan dianggap melanggar hukum, namun Korindo tetap saja mengabaikan peringatan keras tersebut.

Gambar 10. Pola titik panas PT BCA pada 2013 dan 2014



## 4.4 PT Tunas Sawa Erma 1B

### Wilayah bagian utara: sudah dikembangkan pada 2008

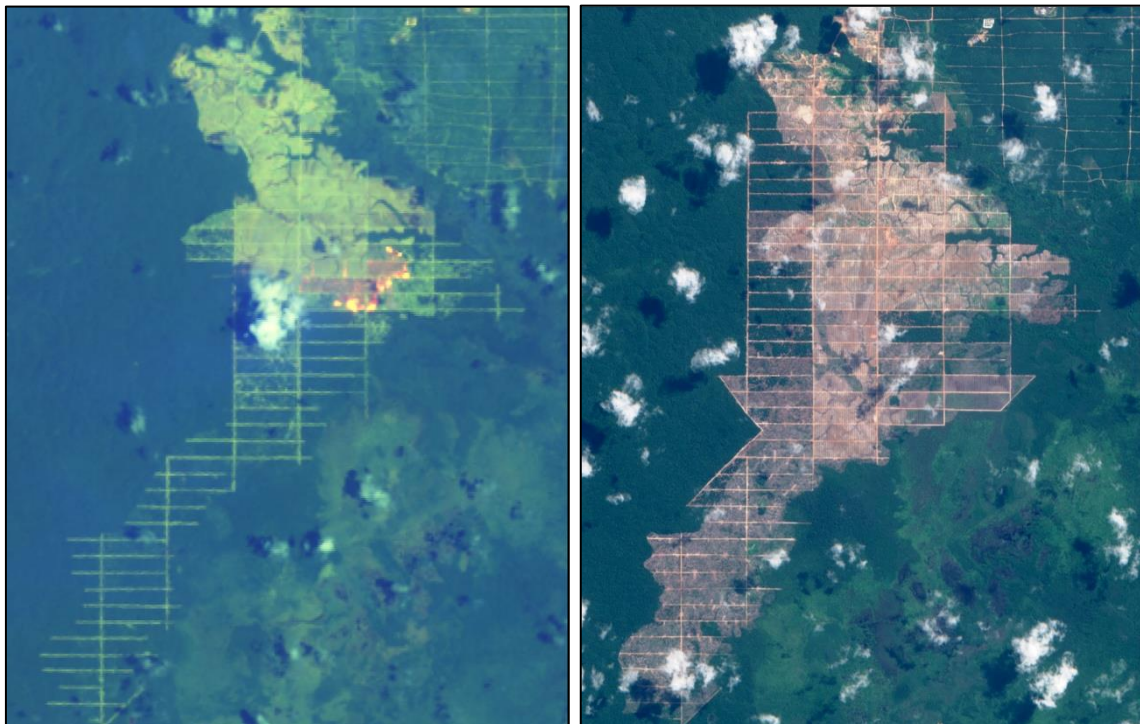
PT Tunas Sawa Erma 1B (PT TSE 1B), yang memegang konsesi untuk wilayah seluas 19.000 hektar, mulai bekerja pada 2005. Perusahaan itu mendekati penduduk di Desa Getentiri dan Ujung Kia serta mengidentifikasi klan-klan pemilik lahan. Klan yang berasal dari Suku Auyu Jair memiliki wilayah adat di kedua desa tersebut. Di Desa Getentiri, ada 11 klan yang memiliki tanah tradisional seluas 7.000 hektar di bagian utara dari wilayah konsesi. Pada 25 Agustus 2005, sebuah upacara tradisional yang disebut Upacara Derma Adat diadakan di Desa Getentiri untuk menandai pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pada 2008, 7.000 hektar lahan telah ditanami kelapa sawit.<sup>75</sup>

### Wilayah bagian selatan: pengembangan baru saja dimulai

Di bagian selatan wilayah konsesi, ada 25 klan Suku Auyu Jair yang memiliki lahan lebih dari 12.000 hektar. Pada 22 Maret 2006, para pemilik lahan di Ujung Kia menolak proposal perkebunan.<sup>76</sup> Namun demikian, pembukaan lahan dimulai di bagian selatan wilayah konsesi pada 2015. Bersamaan dengan pengembangan ini, ada 88 titik panas teridentifikasi pada 2015 dan ada 6 titik lagi pada Januari 2016 (lihat kebakaran secara masif seperti pada Gambar 11 di bawah ini).

Menjelang akhir April 2016, sekitar 2.800 hektar lahan telah dibuka (lihat warna kecoklatan pada gambar sebelah kanan berikut ini) yang terdiri dari 500 hektar hutan primer dan 2.300 hektar hutan sekunder.<sup>77</sup>

**Gambar 11: PT TSE 1B dan pengembangan baru sejak 2015**



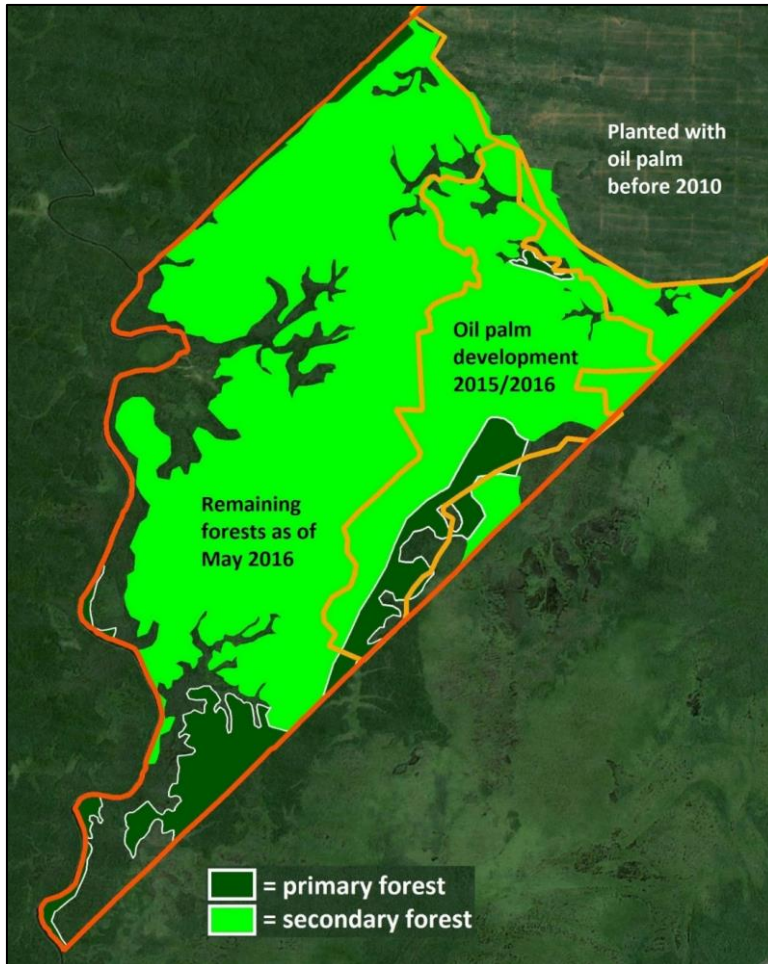
Sumber: Kiri: Citra Landsat 8 selama 24 Oktober 2015 sampai 1 November 2015. Kanan: Citra Sentinel-2, 11 Mei 2016



## Hutan yang tersisa

Pada Mei 2016, kebanyakan areal yang tidak dikembangkan dalam konsesi PT TSE 1B ditutupi oleh hutan primer dan sekunder seperti tampak pada Gambar 12 berikut ini. Hutan yang masih tersisa tersebut terdiri dari 700 hektar hutan primer dan 6.400 hutan sekunder. Wilayah-wilayah tersebut rentan terhadap risiko perusakan beberapa waktu ke depan

**Gambar 12. Hutan yang tersisa dalam konsesi PT TSE 1B sejak Mei 2016**



Sumber: Citra satelit Sentinel-2 selama 11 Mei 2016 dan peta tutupan hutan Kementerian Kehutanan pada 2011

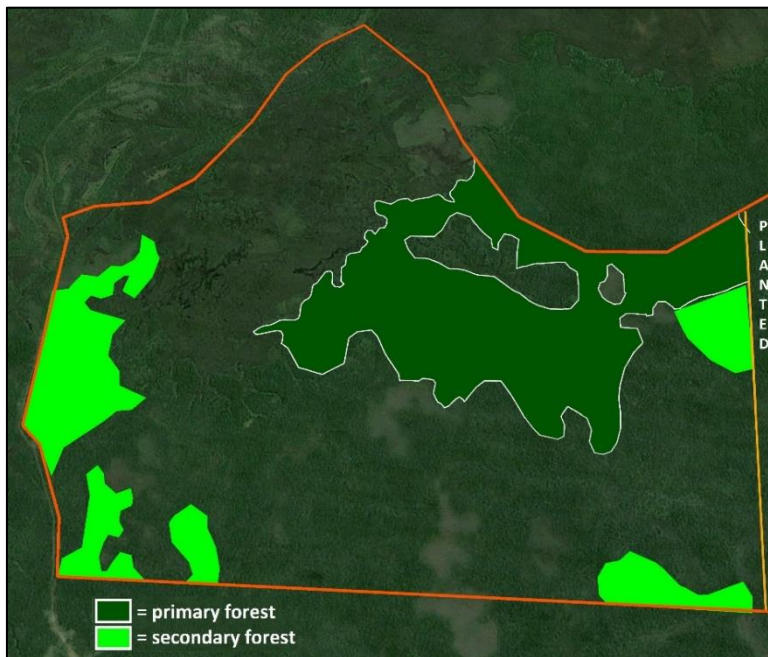
## 4.5 PT Donghin Prabhawa

### 24.000 hektar sudah ditanami

Pengembangan lahan oleh PT Donghin Prabhawa (PT DP) milik Korindo dimulai pada akhir 2010. Menjelang akhir 2015, perusahaan ini sudah menanam di lahan seluas 24.200 hektar. Total ada 6.700 hektar hutan telah dibabat pada kurun waktu 2011 sampai Mei 2016 dan 2.900 hektar diantaranya adalah hutan primer.<sup>78</sup>

Dari Mei 2016, bagian barat dari wilayah konsesi PT DP tidak dibuka. Kira-kira ada sekitar 2.100 hektar hutan primer dan 1.000 hektar hutan sekunder yang masih tersisa seperti tampak pada Gambar 13 berikut.

**Gambar 13. Hutan yang tersisa dari konsesi PT DP dari Mei 2016**

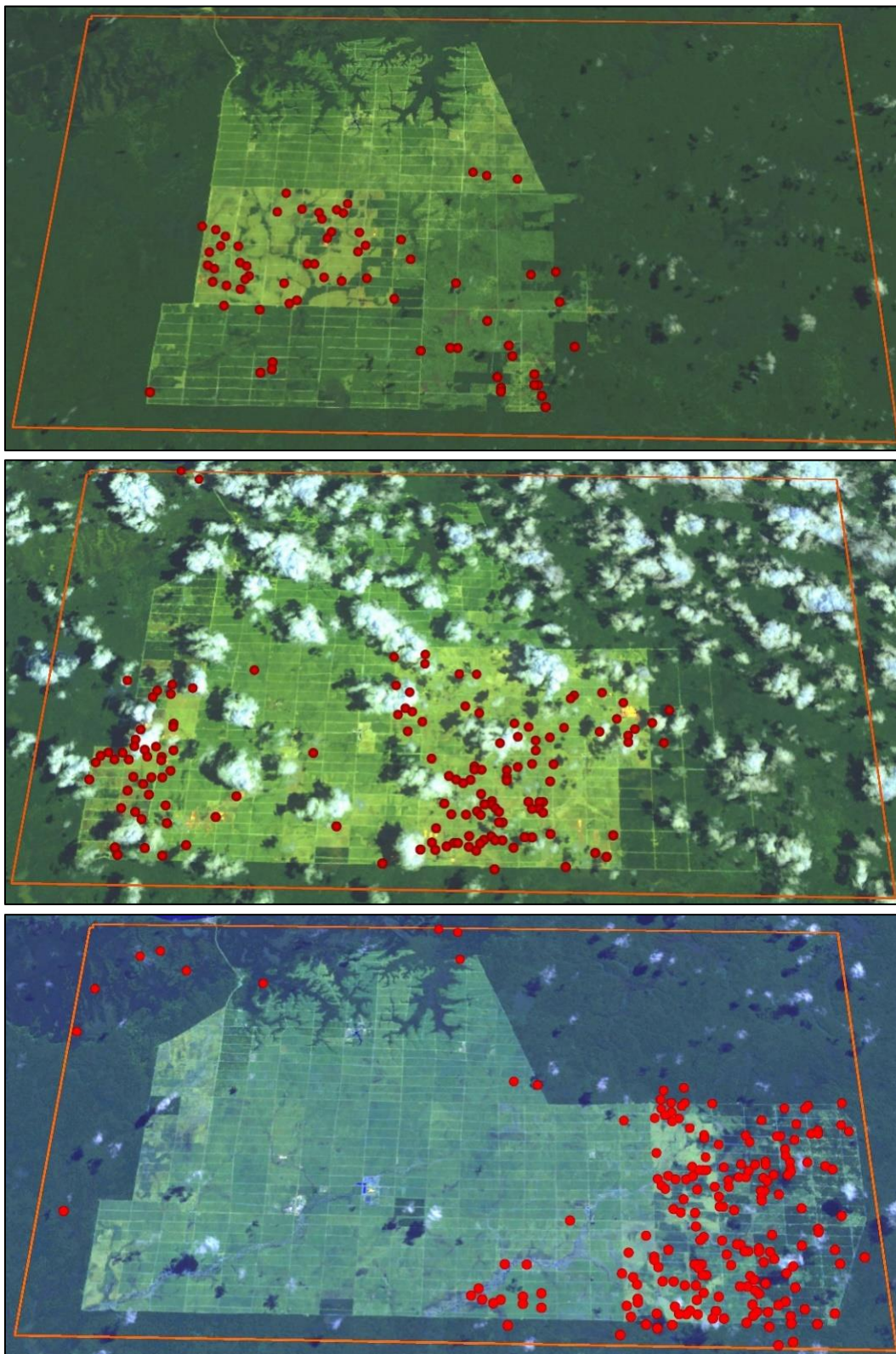


Sumber: Peta tutupan hutan Kementerian Kehutanan selama 2009

### Analisa kebakaran

Gambar 14 di bawah ini menunjukkan titik panas yang terekam pada 2013, 2014, dan 2015, yang masing-masing ditumpangi dengan citra-citra satelit pada tahun-tahun berikutnya. Pengembangan PT DP telah dibarengi dengan kebakaran. Total ada 351 titik panas yang terekam dalam konsesi PT DP tersebut selama kurun waktu dari 2013 sampai 2015 (43 titik di 2013, 144 pada 2014, dan 164 pada 2015). Kebakaran biasanya terjadi beberapa bulan setelah deforestasi sehingga menjelaskan bahwa Korindo menggunakan api untuk membersihkan biomasa dari tanah dalam mempersiapkan penanaman.

Gambar 14. Titik panas pada 2013, 2014 dan 2015



Sumber: Citra Landsat 8 selama 21 sampai 29 Agustus 2013, 24 Oktober sampai 1 November 2014, dan 16 sampai 26 Juni 2015 secara berurutan. Fire Information for Resource Management System (FIRMS), <http://go.nasa.gov/27awNFg>

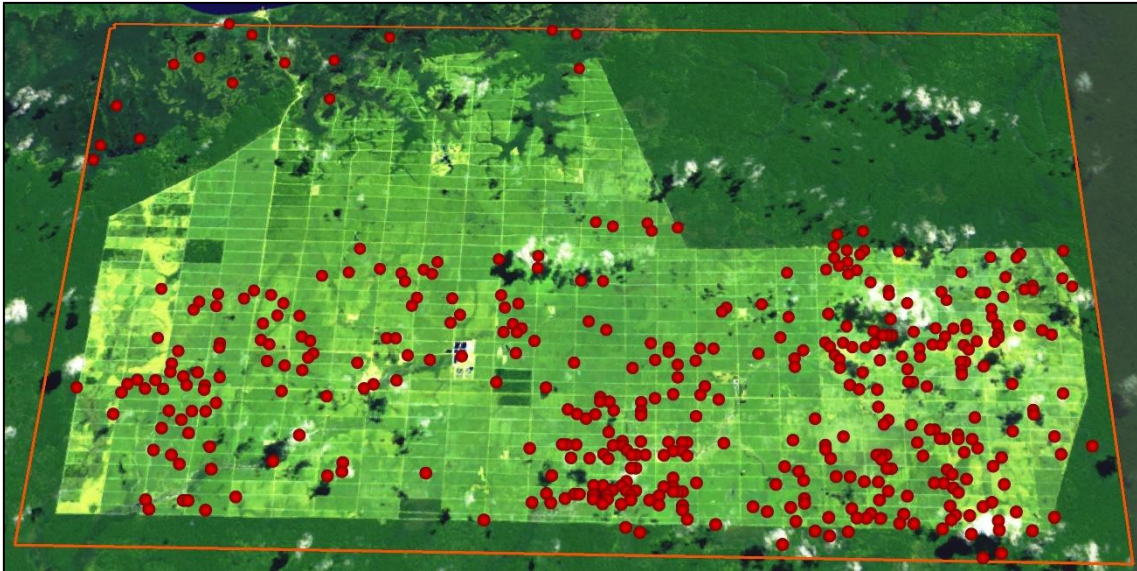
Data titik panas diambil untuk wilayah yang berada di dalam segi empat berwarna orange. Gambar 14 di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2013 sampai 2015, hampir tidak ada api di wilayah berhutan di sekeliling pengembangan perkebunan. Selain itu, api juga tidak ada di wilayah-wilayah yang



telah ditanami kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi hanya pada tahap pembukaan lahan dimana sebagian besar kebakaran terjadi selama musim kemarau antara Juli dan Oktober.

Gambar 15 berikut menunjukkan bahwa semua titik panas tercatat selama kurun waktu dari 2013 sampai 2016. Pada 2016, ada 12 titik panas yang dicatat pada pertengahan Mei.

**Gambar 15. Titik panas di wilayah konsesi PT DP pada 2013 – 2016**



Sumber: Citra Landsat 8 selama 8 sampai 16 Mei 2016. Fire Information for Resource Management System (FIRMS), <http://go.nasa.gov/27awNFg>

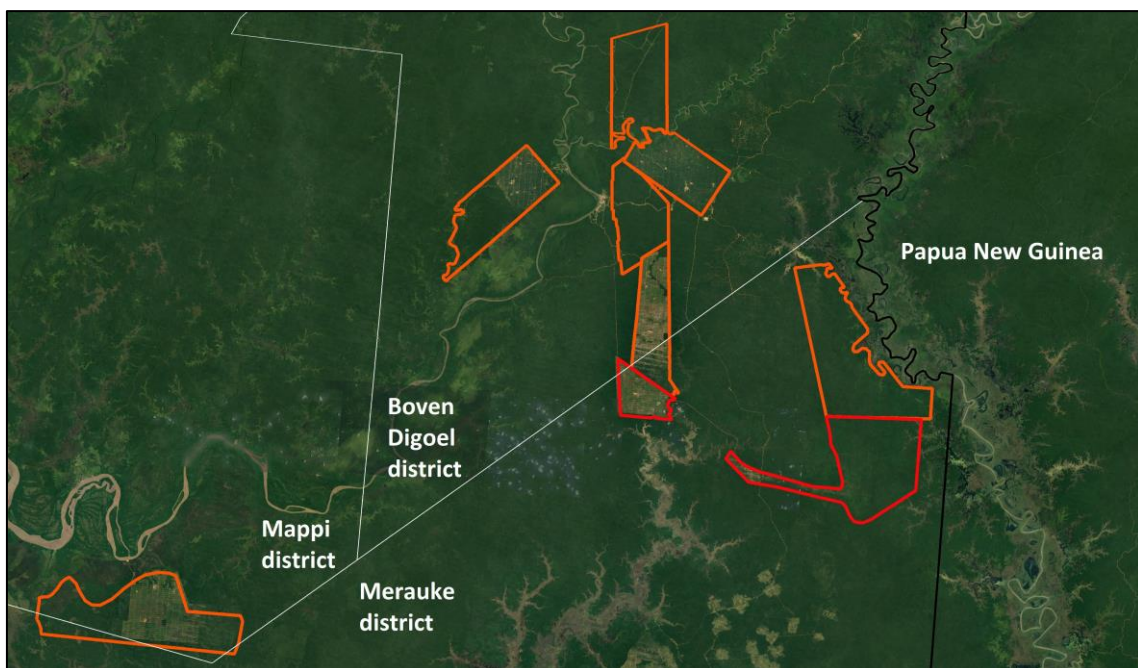


## 4.6 PT Bio Inti Agrindo milik Daewoo

Konglomerat asal Korea, Daewoo (yang baru-baru ini berganti nama menjadi Posco Daewoo) mempunyai konsesi kelapa sawit yang berdekatan dengan Korindo. Gambar 16 di bawah ini menunjukkan bahwa perkebunan Korindo ditandai warna orange, sementara perkebunan milik Daewoo berwarna merah. Perusahaan perkebunan milik Daewoo, yang disebut PT Bio Inti Agrindo (PT BIA), terletak di Kabupaten Merauke. Menurut izin pelepasan kawasan hutan milik Daewoo, perusahaan ini mencakup wilayah seluas 36.400 hektar.<sup>79</sup>

Daewoo baru-baru ini memberikan konfirmasinya (pada Mei 2016) bahwa perusahaannya telah diberi saran oleh Korindo terkait dengan pengoperasian perkebunannya.<sup>80</sup> Daewoo memiliki 85 persen saham di PT BIA pada September 2011.<sup>81</sup> Pemilik 15 persen saham perusahaan sisanya tidak diketahui, meskipun besar kemungkinan itu adalah Korindo.

**Gambar 16. Lokasi perusahaan perkebunan PT Bio Inti Agrindo milik Daewoo (ditandai warna merah)**



### Dikeluarkan dari *Sovereign Wealth Fund* terbesar di dunia

Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, Global Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (Norwegian Government Pension Fund Global/the Fund), merupakan pemain utama dalam bidang Investasi Tanggung Jawab Sosial (Socially Responsible Investasi/SRI). Pada 17 Agustus 2015, The Fund mengumumkan dikeluarkannya Daewoo dan perusahaan induknya POSCO karena PT BIA menyebabkan sebuah risiko kerusakan lingkungan yang parah dan tidak dapat diterima.<sup>82</sup> Sebelumnya, The Fund telah melakukan divestasi dari 27 perusahaan kelapa sawitnya karena “praktik-praktik produksi yang tidak berkelanjutan.”<sup>83</sup> Lebih lanjut, The Fund memandang perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor dengan “praktik-praktik lingkungan dan sosial yang tidak berkelanjutan” sebagai sebuah risiko terhadap tujuan finansial jangka panjangnya, dan telah memenuhi penjualan strategis ekuitas di bidang kelapa sawit, batubara, dan pertambangan.

### Titik panas

Sebagaimana terjadi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan Korindo, PT BIA berikut semua bukti telah mengarahkannya pada penggunaan api secara sistematis selama proses pembukaan lahan.

Pembukaan blok sebelah barat milik PT BIA seluas 6.800 hektar dimulai pada 2012, yang dilanjutkan pada 2013, dan selesai pada 2014.

Gambar 17 menunjukkan korelasi antara deforestasi dan kebakaran di blok sebelah barat sebagaimana dipublikasikan dalam laman Awasi MIFEE pada November 2015.<sup>84</sup> Warna ungu menandai deforestasi, sementara warna orange adalah kebakaran.

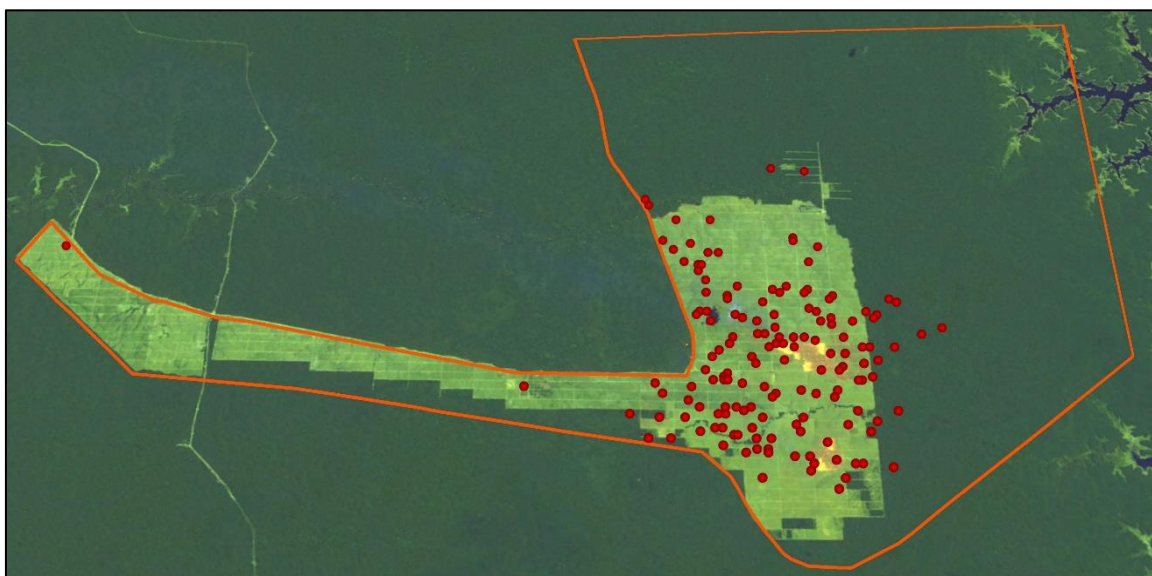
**Gambar 17. Deforestasi dan kebakaran di blok sebelah barat milik PT BIA pada 2012, 2013 dan 2014**



Sumber: AwasiMiffee, Merauke terbakar, tapi apakah akan menuduh perkebunan?, 20 November 2015, <http://bit.ly/28LFIFf>.

Pada September dan Oktober 2015, ada 158 titik panas yang terekam di dalam konsesi seluas 29.400 hektar di blok sebelah timur, yang terkonsentrasi di areal yang telah terdeforestasi pada awal tahun tersebut. Citra satelit pada Gambar 18 berikut juga menunjukkan dua kebakaran besar yang terjadi bersama di atas lahan seluas 200 hektar.

**Gambar 18. Titik panas di wilayah konsesi PT BIA pada September dan Oktober 2015**



Sumber: Citra Landsat 8 dari 22 sampai 30 September 2015. FIRMS, <http://go.nasa.gov/27awNFg>.

### Deforestasi

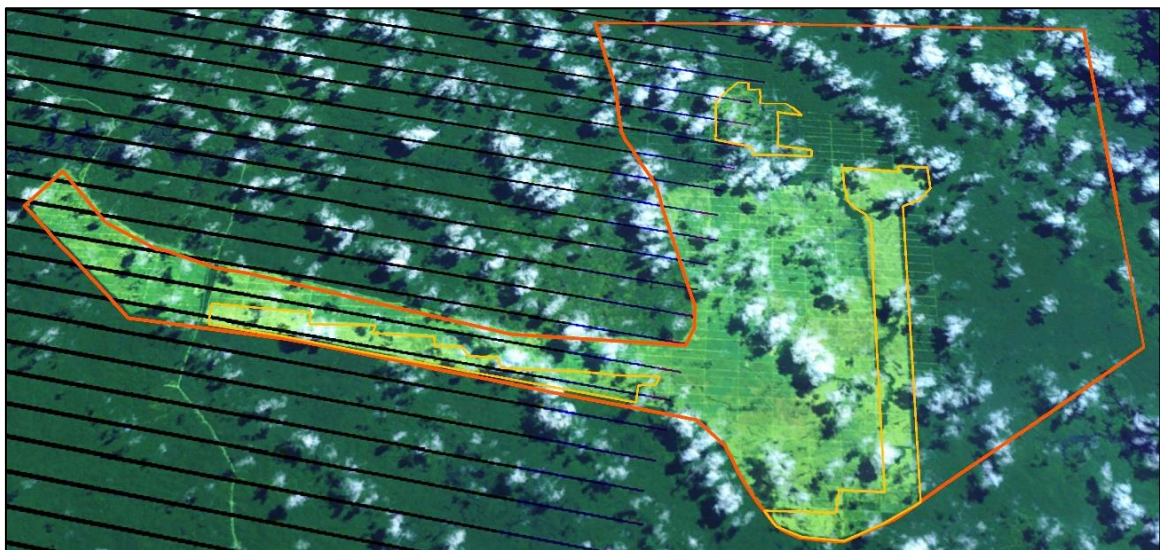
Menurut peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wilayah konsesi PT BIA terdiri dari hutan primer seluas 19.800 hektar, hutan sekunder seluas 15.900 hektar dan jalan air 500 hektar pada 2011.



Sementara blok sebelah barat milik PT BIA telah dikonversi sepenuhnya menjadi perkebunan kelapa sawit pada akhir 2014, deforestasi saat ini sedang terjadi di blok sebelah timur. Gambar 19 berikut menunjukkan wilayah blok sebelah timur yang dibuka pada Mei 2016. Wilayah tersebut ditandai warna orange (total luasnya 3.300 hektar) yang dibuka selama 8 bulan dari Oktober 2015 sampai dengan Mei 2016.

Pada Mei 2016, areal hutan seluas kira-kira 16.000 hektar masih berdiri di wilayah konsesi PT BIA dan 9.000 hektar diantaranya adalah hutan primer.<sup>85</sup> Ini berarti bahwa sejak 2012, Daewoo telah melakukan deforestasi terhadap hutan primer seluas lebih dari 10.000 hektar dan hutan sekunder lebih dari 9.000 hektar.

**Gambar 19. Wilayah yang dibuka di blok sebelah timur milik PT BIA pada Mei 2016**



Sumber: Citra Landsat 7 dari 8 Mei sampai 9 Juni 2016. Citra Landsat 8 dari 22 sampai 30 September 2015

**Foto: Blok sebelah barat milik PT BIA**



© Mighty; 5 Juni 2016; 6°54'53.46" Lintang Selatan, 140°28'26.20" Bujur Timur



## 5. Profil perusahaan Korindo

### 5.1 Bisnis dan kepemilikan

Korindo mempunyai sekitar 20.000 karyawan dan terdiri lebih dari 30 perusahaan yang tergabung. Bisnis utamanya adalah sumber daya alam dengan mengoperasikan penebangan pohon, konsesi bubur kayu dan kelapa sawit, termasuk juga kayu lapis, kayu serpih dan produksi minyak sawit. Bisnis-bisnis Korindo lainnya termasuk manufaktur kertas koran, industri berat termasuk kincir angin, pembiayaan, dan real estat.<sup>86</sup> Pendapatan-pendapatannya tidak terbuka.

**Foto: Kantor Korindo di Jakarta**



Sumber: Flickr, BxHxTxCx, diambil pada 22 Desember 2011, <http://bit.ly/1t2Rjbe>

#### Sebuah perusahaan yang tidak transparan

Korindo merupakan sebuah perusahaan yang tidak transparan. Karena memang bukan perusahaan publik, maka tidak ada keharusan untuk transparan dari bursa efek. Korindo tidak membuat laporan tahunan ke publik, sehingga tidak menyajikan informasi tentang wilayah bisnis, penerimaan dan pendapatan. Korindo memiliki sebuah struktur bisnis yang rumit dengan 30 perusahaan yang tergabung dalam pengoperasian beberapa bisnis yang agak beragam. Banyak afiliasi Korindo di Indonesia dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura dan Hong Kong sehingga kemungkinan besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain di yurisdiksi yang lain. Meskipun tautan terhadap perusahaan-perusahaan di yurisdiksi yang lain tersebut tidak dapat dilacak, melalui dokumen Panama, Pemimpin Korindo Seung Eun-ho ternyata memiliki beberapa perusahaan yang terdaftar di Kepulauan British Virgin.<sup>87</sup> Kompleksnya struktur bisnis antara lain membuatnya tidak mungkin untuk menentukan kepemilikan yang pasti dari bisnis-bisnis tersebut termasuk apakah atau dimanakah perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya.



## Kepemilikan

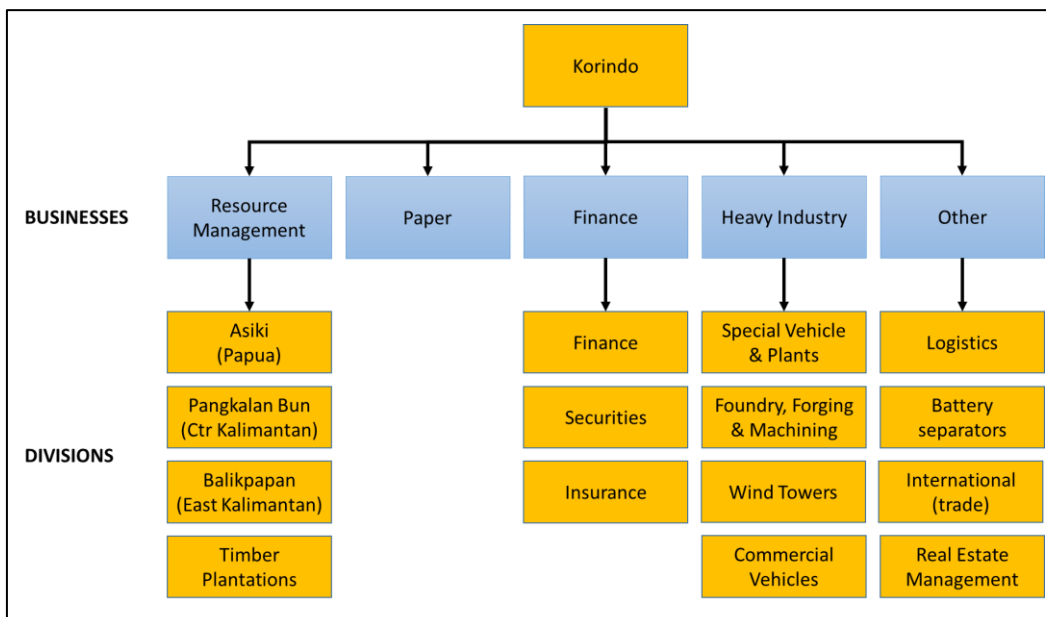
Korindo mayoritas dimiliki oleh keluarga Seung dari Korea Selatan. Pada 1948, perusahaan Korea Dongwha Enterprise didirikan oleh Seung Sang-bae yang meninggal pada 2009.<sup>88</sup> Sejak pertengahan 1960s, Dongwha telah mengimpor kayu dari Indonesia, Malaysia, dan banyak negara lainnya. Putra Seung Sang-bae, Seung Eun-ho, mengadakan perjalanan ke Indonesia pada 1969 untuk mencari kayu yang berkualitas lebih tinggi. Pada 1970, Dongwha membeli konsesi penebangan kayu di Kalimantan dan mendirikan sebuah perusahaan Indonesia. Pada 1976, Grup Korindo diluncurkan dengan nama yang terdiri dari kata-kata dari bahasa Korea dan Indonesia.<sup>89</sup> Seung Eun-ho tetap berada di Indonesia sebagai Chief Executive Officer (CEO) di Korindo, sambil memperluas pengoperasian bisnis di sektor-sektor lainnya seperti kayu lapis dan kertas koran, dan kemudian juga bermain di mesin berat dan kelapa sawit. Seung Eun-ho telah dilaporkan sebagai Pemimpin dan CEO Korindo.<sup>90</sup> Tetapi, beberapa dokumen menunjukkan bahwa saat ini ia bertindak sebagai Pemimpin, sedangkan Beom Soo (Robert) Seung menjadi CEO.<sup>91</sup>

Putra kedua Seung Sang-bae's, Seung Myung-ho, sekarang menjadi CEO di Dongwha Enterprise Co. Ltd (Dongwha). Pendapatan total Dongwha pada 2015, yang terdaftar di Bursa Efek Korea<sup>92</sup>, sebesar KRW 675 miliar, atau setara dengan USD 0,6 miliar.<sup>93</sup> Perusahaan ini memproduksi beragam jenis kayu olahan seperti misalnya MDF (medium-density fiberboard) dan papan partikel. Selain itu, perusahaan ini juga menjual produk-produk kayu serta mempunyai dua media koran Korea (Korea Times dan Hankook Ilbo).<sup>94</sup> Dari 31 Desember 2015, Seung Eun-ho, Pemimpin Korindo, memiliki 9,3 persen saham di Dongwha Enterprises.<sup>95</sup> Sebelumnya, Seung Eun-ho juga merupakan Pemimpin di Dongwha Holdings.<sup>96</sup> Sekarang, bisnis-bisnis Dongwha Enterprises dan Korindo tampaknya dijalankan secara terpisah dan sebagian besar dipunyai oleh pemilik-pemilik yang berbeda.

## Kegiatan bisnis Korindo

Gambar 20 di bawah ini memberi gambaran sekilas tentang bisnis-bisnis Korindo berdasarkan laman perusahaannya.<sup>97</sup> Manajemen Sumber Daya selalu menjadi komponen utama dari operasi Korindo yang terdiri dari penebangan pohon, pengolahan kayu (kayu lapis, serpih kayu), pengoperasian perkebunan bubur kayu dan kelapa sawit.

**Gambar 20. Bisnis dan divisi-divisi Korindo**



## 5.2 Penebangan kayu dan kayu lapis

### Salah satu manufaktur kayu lapis terbesar di Indonesia

Pengoperasian Manajemen Sumber Daya milik Korindo memiliki tiga klaster geografis, yaitu: Asiki di Papua, Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah, dan Balikpapan di Kalimantan Timur. Ketiga klaster itu mewakili pengoperasian pengolahan kayu dan penebangan kayu –yang sebagian besar adalah kayu lapis-milik perusahaan. Divisi lainnya adalah Perkebunan Kayu yang terutama merujuk pada sebuah perkebunan bubur kayu yang luas serta pabrik pengolahan serpih kayu yang menyertainya di Kalimantan Tengah.

Korindo merupakan salah satu manufaktur kayu lapis terbesar di Indonesia. Pada 2014, pangsaanya diperkirakan sekitar 4 persen dari produksi dunia.<sup>98</sup> Tetapi sekarang, Indonesia mengekspor lebih sedikit kayu lapis, sementara produksi kayu lapis global meningkat secara signifikan.<sup>99</sup> Pada 2014, tujuan ekspor utama untuk kayu lapis dari Indonesia adalah Jepang (27 persen), China (26 persen) dan Timur Tengah (14 persen).<sup>100</sup>

Kapasitas produksi kayu lapis per tahun saat ini berkisar antara 500.000 – 800.000 meter kubik (m<sup>3</sup>). Dokumen terakhir dari badan-badan sertifikasi menyatakan bahwa kapasitas keseluruhan kayu lapis produksi Korindo mencapai 772.000 m<sup>3</sup>.<sup>101</sup> Korindo sendiri melaporkan kapasitas produksinya sekitar 564.000 m<sup>3</sup> seperti disebut dalam lamannya meskipun informasi ini sudah tidak termutakhirkan.<sup>102</sup> Informasi aktual produksi kayu lapis Korindo tidak tersedia untuk publik.

### Asiki (Papua)

Korindo mulai melakukan penebangan di Papua pada 1993 di wilayah konsesi penebangan seluas 464.000 hektar melalui PT Bade Makmur Orissa.<sup>103</sup> Saat ini, Korindo mempunyai dua konsesi aktif untuk penebangan di Papua, yaitu PT Tunas Timber Lestari dan PT Inocin Abadi, dengan wilayah konsesi masing-masing seluas 215.000<sup>104</sup> dan 100.000<sup>105</sup> hektar. Gambar 21 di bawah ini menunjukkan lokasi konsesi-konsesi penebangan kayu milik Korindo di Papua (dalam warna merah) dan konsesi kelapa sawit (dalam warna ungu). Produksi dari konsesi besar PT Bade Makmur Orissa terakhir dilaporkan pada 2012.<sup>106</sup>

Perusahaan PT Korindo Abadi mengolah kayu di Desa Asiki. Perusahaan ini punya izin untuk memproduksi 100.000 m<sup>3</sup> kayu lapis, 100.000 m<sup>3</sup> kayu lapis berlapis film (film faced plywood), dan 8.000 m<sup>3</sup> kayu gergajian setiap tahunnya.<sup>107</sup>

Besar kemungkinan bahwa Korindo menggunakan kayu hasil tebangannya sendiri untuk pabrik kayu lapis PT Korindo Abadi. Namun demikian, mungkin juga perusahaan itu punya pemasok-pemasok dari pihak ketiga. Korindo juga merupakan pemasok pihak ketiga untuk produk yang tidak layak untuk kayu lapis dan produksi kayu gergajian. Misalnya, Korindo juga sangat mungkin untuk menjual sebagian dari produk-produk kayunya di Papua ke pabrik besar PT MedcoPapua Industri Lestari di Merauke. Perusahaan ini merupakan pabrik dengan kapasitas produksi serpih kayu sebesar 1.800.000 m<sup>3</sup> per tahun dan 200.000 m<sup>3</sup> palet kayu tiap tahunnya. Pabrik Korea LG International juga telah mendapatkan 50 persen dari output dan 40 persen saham dari proyek itu.<sup>108</sup>

Gambar 21. Lokasi pengoperasian Korindo di Papua

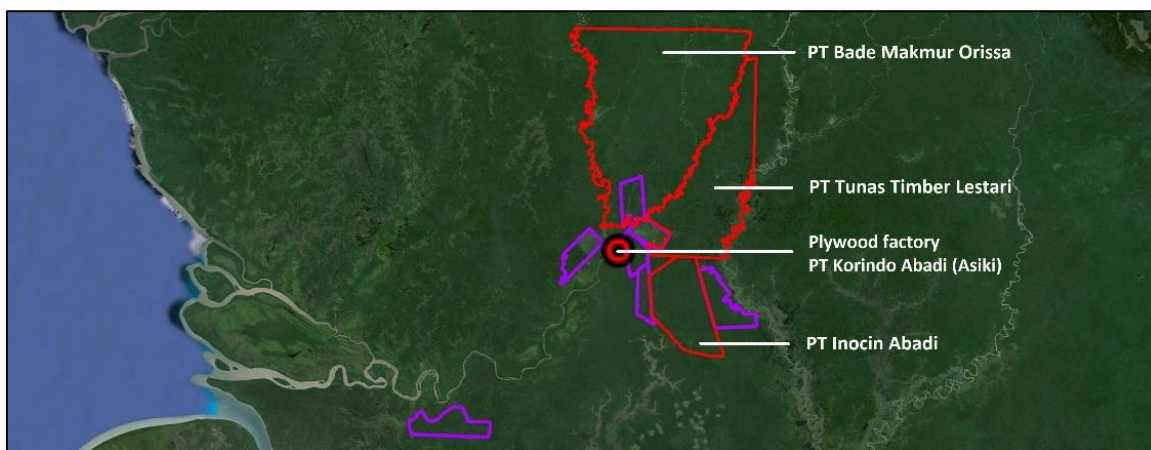


Foto: Papan penanda konsesi penebangan PT Inocin Abadi milik Korindo



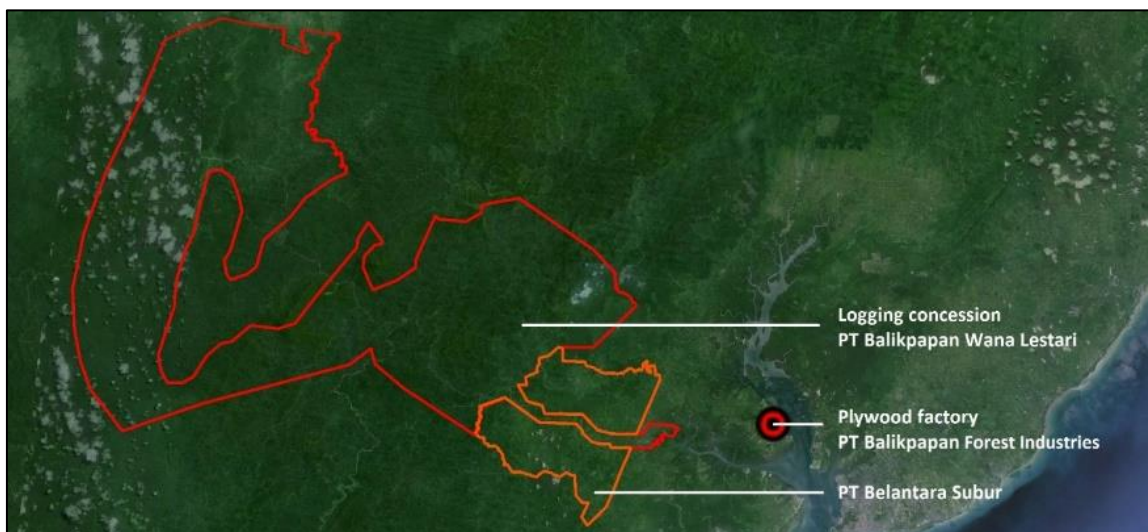
© Mighty; 4 Juni 2016; 6°46'32.46" Lintang Selatan, 140°38'32.78" Bujur Timur

### Balikpapan (Kalimantan Timur)

PT Balikpapan Wana Lestari, yang sebelumnya PT Balikpapan Forest Industries, memiliki konsesi penebangan kayu seluas 141.000 hektar yang terentang di tiga Kabupaten, yaitu Paser, Penajam Paser Utara, dan Kutai Barat.<sup>109</sup> Pabrik PT Balikpapan Forest Industries yang terletak di Desa Jenebora di Kabupaten Penajam Paser Utara ini mempunyai kapasitas produksi 100.000 m<sup>3</sup> kayu lapis, 52.000 m<sup>3</sup> kayu lapis berlapis film dan 7.000 m<sup>3</sup> kayu gergajian setiap tahunnya.<sup>110</sup> Perusahaan tersebut berhenti beroperasi pada Desember 2012 dan memecat 1.700 pekerjanya setelah mengalami kerugian selama kurun waktu 2009 sampai 2011. Perusahaan itu dibuka kembali pada 2013 dengan sistem kerja yang baru. Menurut laporan, pada 2013 perusahaan itu mengekspor produknya terutama ke Arab Saudi (50 persen) dan ke Jepang (26 persen).<sup>111</sup>



**Gambar 22. Lokasi pengoperasian Korindo di Kalimantan Timur**



### **Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah)**

Korindo sekarang telah memiliki konsesi penebangan terpilih yang aktif di Kalimantan Tengah milik PT Trisetia Intiga. Konsesi tersebut mencakup wilayah seluas 69.000 hektar yang terletak di Kabupaten Lamandau.<sup>112</sup> Bagian selatan dari wilayah konsesi bertumpangtindih dengan perkebunan kelapa sawit kira-kira seluas 18.000 hektar. Menurut badan sertifikasi, PT Equality Indonesia, tidak ada proses resolusi terkait dengan wilayah-wilayah yang bertumpangtindih tersebut.<sup>113</sup>

Perusahaan PT Korindo Ariabima Sari beroperasi di kota Pangkalan Bun yang memproduksi kayu lapis, kayu lapis berlapis film, dan UCP (Urethane Coated Plywood).<sup>114</sup> Kapasitas per tahunnya diperkirakan sekitar 210.000 m<sup>3</sup> untuk kayu lapis, 20.000 m<sup>3</sup> untuk lapisan kayu (veneer), 137.500 m<sup>3</sup> untuk kayu lapis berlapis film, 72.500 m<sup>3</sup> Urethane Coated Plywood, 24.000 m<sup>3</sup> papan blok, dan 16.000 m<sup>3</sup> kayu gergajian.<sup>115</sup> Selain itu, ada 15.000 ton formaldehid dan 24.500 ton urea formaldehydes yang dapat dipergunakan.<sup>116</sup>

Laporan Februari 2016 menyebutkan bahwa perusahaan mempunyai 1.228 karyawan dan 645 karyawan lepas. Dikatakan pula bahwa Korindo berencana untuk merumahkan setengah dari para karyawan lepas dan mengurangi jam kerja karyawan tetap karena rendahnya permintaan kayu lapis di Timur Tengah. Akibatnya, para pekerja berencana mengadakan pemogokan massal.<sup>117</sup>

PT Korindo Ariabima Sari kemungkinan juga memiliki pemasok-pemasok pihak ketiga yang mengirimkan kayu kualitas tinggi yang diperlukan untuk memproduksi kayu lapis.

Pada 1 Agustus 2016, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugiarto Sabran, mengunjungi perusahaan PT Korindo Ariabima Sari di Pangkalan Bun. Warga setempat sudah mengeluhkan asap dan debu yang dihasilkan dari cerobong asap pabrik. Kondisi ini menyebabkan gatal-gatal dan penyakit-penyakit lainnya. Pabriknya juga terletak di dekat kawasan padat penduduk. Gubernur memerintahkan Korindo agar memecahkan masalah polusi tersebut dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak dijalankan, maka perusahaan itu akan diberi sanksi.<sup>118</sup>

**Gambar 23. Lokasi pengoperasian Korindo di Kalimantan Tengah**



### Konsumen kayu lapis dari Korindo

Laporan mengatakan bahwa kayu lapis dari Korindo terutama diekspor ke Timur Tengah.<sup>119</sup> Perusahaan Transcontinental Indenting Co. LLC (TIC), yang berlokasi di Dubai di Uni Emirat Arab, mengklaim sebagai kantor perwakilan produk-produk kayu lapis Korindo untuk Timur Tengah (tidak termasuk Arab Saudi), yang memesan lebih dari 200.000 produk dari Korindo setiap tahunnya.<sup>120</sup> Sebuah artikel pada April 2009 menyatakan bahwa Korindo mengirimkan ke semua pelabuhan di wilayah Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC)<sup>121</sup> setiap bulannya agar dapat memenuhi kebutuhan klien. “[Korindo] mencarter kapalnya sendiri pada setiap akhir bulan karena tingginya volume pesanan dari para konsumen GCC milik mereka,” kata direktur pengelola TIC Jitendra Bhatia.<sup>122</sup>

## 5.3 Bubur kayu

Korindo mempunyai konsesi bubur kayu yang besar di Kalimantan Tengah milik PT Korinting Hutani (PT KTH). Wilayah konsesi seluas 94.000 hektar merentang di dua Kabupaten, yaitu Lamandau dan Kotawaringin Barat.<sup>123</sup> Pada 2014, 29.000 hektar areal ditanami pohon eucalyptus (*Eucalyptus pellita*), 25.000 hektar pohon pohon akasia (*Acacia mangium*) dan 2.500 hektar dengan pohon waru (*Hibiscus similis*).

PT KTH juga mempunyai pabrik pengolahan serpih kayu di Pangkalan Bun untuk mengolah bubur kayunya. Pabrik ini punya kapasitas produksi sebesar 963.636 m<sup>3</sup> serpih kayu setiap tahunnya. Disamping itu, pabrik tersebut juga mampu memproduksi 265.000 m<sup>3</sup> pelet kayu, 50.000 m<sup>3</sup> lapis kayu (veneer), dan 35.000 m<sup>3</sup> kayu gergajian.<sup>124</sup> Konsumen PT KTH selama kurun waktu dari Mei sampai November 2013 meliputi PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT TELPP) milik perusahaan Jepang Marubeni Corporation<sup>125</sup>, PT Alam Abadi Perkasa (PT AAP), dan UD Fayar Jaya.<sup>126</sup>

Konglomerat bubur dan kertas dari Jepang, Oji Holdings, mempunyai 34.34 persen saham di PT KTH.<sup>127</sup> Konglomerat itu membeli saham sebesar 103 juta US dollar pada Maret 2010.<sup>128</sup> Laporan pada Juli 2013 dan Maret 2014 menyebutkan bahwa volume-volume yang substansial dari serpih kayu produksi PT KTH akan dipasokkan ke Oji di Jepang untuk manufaktur kertas.<sup>129</sup> Pelet kayu kemungkinan besar dikirimkan ke Korea dan Jepang.<sup>130</sup>

PT Belantara Subur adalah konsesi bubur kayu lain milik Korindo. Konsesi itu mencakup lahan seluas 16.475 hektar dan letaknya berdekatan dengan konsesi penebangan kayu PT Balikpapan Wana Lestari milik Korindo di Kalimantan Timur.<sup>131</sup>

### Perkebunan bubur kayu baru di Papua?

Pada September 2015, sumber-sumber dari Korindo dan Pemerintah Papua melaporkan bahwa Korindo sedang mempertimbangkan untuk mendirikan perkebunan bubur kayu di Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Korindo sama-sama tertarik untuk mendirikan pabrik biomasa untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik yang dikombinasikan dengan perkebunan bubur kayu. Pembahasan sudah berjalan di tengah akuisisi 12.000 hektar lahan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Lokasi lahan sesuai pembahasan masih belum jelas, sehingga situasi tutupan hutan yang ada juga tetap masih samar-samar. Akan tetapi, Kabupaten Jayapura saat ini memiliki tutupan hutan primer dan hutan sekunder yang substansial. Menurut juru bicara Korindo, pembangkit listrik itu dapat menghasilkan 10 MW daya dari 7.000 hektar eucalyptus.<sup>132</sup>

## 5.4 Manufaktur kertas koran terbesar di Indonesia

### PT Aspex Kumbong

PT Aspex Kumbong (Aspex), yang terletak di Cileungsi dekat Jakarta di Pulau Jawa, adalah 100 persen perusahaan Korindo. Bahkan perusahaan ini menjadi pabrikan kertas koran terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi sekitar 440.000 ton per tahun.<sup>133</sup> Pelanggan-pelanggan besar Aspex termasuk perusahaan media di Indonesia Kompas Gramedia - antara lain sebagai penerbit koran nasional Kompas dan koran daerah Tribun<sup>134</sup> - dan perusahaan Australia, Oceanic Holding.<sup>135</sup> Oceanic mengekspor kertas bekas ke Aspex, yang kemudian diimpor balik ke Australia dalam bentuk kertas koran, dan juga ke Selandia Baru dan Afrika Selatan. Kertas koran produksi Aspex dikatakan sebagai kertas yang 100 persen hasil daur ulang dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Indonesia.<sup>136</sup>

Aspex juga dilaporkan telah memproduksi jenis-jenis kertas selain kertas koran, seperti misalnya kertas untuk buku tulis, buku teks, dan buku petunjuk telepon.<sup>137</sup> Hanya ada informasi sedikit tentang aspek bisnis Aspex. Tetapi, perusahaan ini mempunyai sertifikat FSC Chain of Custody untuk kertas koran, percetakan & penulisan dan kertas pembungkus makanan.<sup>138</sup>

Kousa International, anak perusahaan Korindo di Amerika Serikat adalah agen pembelian eksklusif di Amerika Serikat.<sup>139</sup> Kertas utama yang dijual dikatakan cocok untuk kertas koran, kertas untuk buku petunjuk telepon, kertas tulis dan cetak, serta kertas untuk penggunaan lainnya. Tetapi, database yang menelusik pengapalan ke Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada impor kertas oleh Kousa International ke Amerika Serikat. Ekspor yang baru dilakukan oleh Kousa adalah kertas daur ulang ke PT Aspex Kumbong dari Juli 2015.<sup>140</sup>

### Penghindaran pajak?

Aspex dikaitkan dengan kasus dugaan penghindaran pajak oleh Pemimpin Korindo Seung Eun-ho dan putra-putranya. Layanan Pajak Nasional Korea (NTS) pertama kali menyelidiki kasus ini dan menyerahkannya kepada Kantor Kejaksaan Negeri Pusat Seoul pada April 2014. Menurut jaksa, Seung Eun-ho, seorang warga negara Korea, dan putra-putranya diduga menggunakan sebuah perusahaan kertas yang dibangun di surga pajak di luar negeri dengan nama-nama orang lain untuk menghindari pembayaran pajak di Korea. Seung dilaporkan telah mengklaim bahwa dia tidak punya alasan untuk membayar pajak di Korea, karena saat ini dia bukan seorang warga di sana. Tetapi, NTS yakin bahwa Seung dan putra-putranya tinggal di Korea selama lebih dari satu tahun selama periode waktu 2 tahun untuk pembayaran pajak, sehingga mereka diharuskan membayar pajak menurut hukum Korea. Dari



Oktober 2014, Seung Eun-ho belum juga dipanggil untuk penyelidikan.<sup>141</sup> Pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan dan pendapatannya masih dilaporkan dalam laman milik Layanan Pajak Nasional Korea pada April 2016.<sup>142</sup>

## 5.5 Keuangan

Korindo mempunyai 20 persen saham di sebuah perusahaan Indonesia, PT NongHyup Korindo Securities Indonesia.<sup>143</sup> Diantara berbagai kegiatan lainnya, perusahaan ini berurusan dengan perdagangan ekuitas dan investasi perbankan.<sup>144</sup> Perusahaan tersebut saat ini menjalankan bisnis-bisnis Korindo di bidang Keuangan dan Sekuritas, yang didaftar secara terpisah dalam laman Korindo pada 2010. Pemilik mayoritas, Nonghyup Financial Group, merupakan grup keuangan terbesar kedua di Korea dari segi asetnya.<sup>145</sup>

PT Meritz Korindo Insurance adalah perusahaan asuransi umum joint venture yang melibatkan Meritz Fire & Marine Insurance Company, Ltd. (dengan 51 persen kepemilikan saham) dan Korindo Group (49 persen). Perusahaan ini memberikan beberapa produk asuransi, seperti misalnya asuransi kebakaran, segala risiko property, kargo laut, kontraktor/konstruksi dan asuransi kendaraan bermotor.<sup>146</sup>

## 5.6 Industri Berat

Menurut laman Korindo pada 2010, bisnis-bisnis Industri Berat milik Korindo terdiri dari empat divisi, yaitu kincir angin, pengecoran logam (rangka baja), kendaraan khusus dan kendaraan komersil.<sup>147</sup> Selama mempersiapkan laporan ini, sepertinya tidak mungkin untuk mendapatkan gambaran terkini yang lengkap mengenai kegiatan-kegiatan Industri Berat milik Korindo, maka informasi berikut ini harus dilihat dalam pandangan semacam ini.

Kincir angin produksi Korindo telah dipasang di Amerika Serikat, India, Australia, dan Selandia Baru. Kawasan produksinya terletak di Cilegon, Provinsi Banten di Jawa. Sejak 2006, Korindo telah memproduksi lebih dari 1.200 kincir angin untuk pasar di Amerika Serikat. Kousa International sebagai anak perusahaan Korindo di Amerika Serikat menjadi agen eksklusif untuk Korindo Wind. Presiden Kousa International adalah Ricky Seung.<sup>148</sup> Jika ditelisik di database pengapalan ke Amerika Serikat, Kousa International telah mengimpor 5.900 ton komponen kincir angin dari PT Korindo Heavy Industry pada Februari 2016 dan 2.000 ton lainnya pada April 2016.<sup>149</sup> Pelanggan energi angin Korindo mencakup perusahaan energi asal Spanyol, Iberdrola<sup>150</sup>, perusahaan asal Jerman, Siemens<sup>151</sup>, perusahaan Denmark, Vestas, perusahaan berbasis di Amerika Serikat, Clipper, dan perusahaan Spanyol, Gamesa.<sup>152</sup>

Selama bertahun-tahun, para klien bisnis pengecoran logam dan besi tempa dari Korindo mencakup PT Doosan Heavy Industries (2010-2012), Sookook Engineering (2012), PT Krakatau Steel (2011-2012), PT Hanazono Engineering Indonesia (2012), PT Adhi Karya/PT GS -Korea (2013-2014), PT FLSmidt Indonesia (2011-2012), PT JGC Indonesia; sebuah anak perusahaan Japan Gas Corporation (2012), dan SWC-BRE JO (2012).<sup>153</sup> Dari sini terlihat bahwa bisnis Korindo di bidang ini tidak punya banyak klien semenjak 2012. Dari klien-klien yang terdaftar tersebut, kebanyakan berpusat dari Korea Selatan dan Jepang. Baru-baru ini, Korindo Heavy Industry juga mengerjakan konstruksi untuk pabrik pengolahan minyak sawitnya sendiri untuk PT Dongin Prabhawa dan PT Berkat Cipta Abadi.<sup>154</sup>

Korindo Energy (Singapore) Pte. Ltd. tergabung di Singapura pada 3 November 2010 dan tidak lagi ditulis dalam daftar di laman Korindo pada 2010.<sup>155</sup> Perusahaan tersebut memberikan layanan mesin untuk sektor kelautan dan energi, dan brosurnya merujuk pada sederet nama-nama klien yang panjang, sebagian besar adalah sektor kelautan.<sup>156</sup>

Pada 2007, Korindo menjadi mitra perakitan Hyundai untuk memproduksi truk dan bus. Korindo mendirikan sebuah pabrik di Provinsi Banten di bagian barat Pulau Jawa setelah menginvestasikan sebesar 25 juta US dollar.<sup>157</sup> Hyundai mengakhiri kontraknya pada 2012.<sup>158</sup>

Menurut laman Korindo pada 2010, Korindo Heavy Industry memproduksi komponen otomotif untuk beragam jenis konsumen di pabrik miliknya di Tangerang, Provinsi Banten.<sup>159</sup> Konglomerat asal Indonesia, Bakrie & Brothers, mengakuisisi perusahaan itu pada 2012 atau 2013<sup>160</sup>, meskipun keberadaan beberapa bagian dari perusahaan itu masih tetap ada. Pada Maret 2015, Chen Chong Kyong, salah satu direktur Korindo Motors (juga terletak di Tangerang) ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan bus-bus Transjakarta dari pemerintah pada 2013.<sup>161</sup>

Bisnis Korindo untuk kendaraan khusus mengklaim mempunyai banyak konsumen menurut laman Korindo pada 2010. Konsumen-konsumen itu terutama dari perusahaan-perusahaan transportasi dan pertambangan.<sup>162</sup>

## 5.7 Pertambangan batubara

Korindo mempunyai setidaknya 30,6 persen saham di sebuah proyek batubara yang besar yang terletak di Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah. Cadangan yang diperkirakan adalah sekitar 337 juta ton batubara yang mengandung aspal, kapasitas produksi diperkirakan 4 juta ton per tahun. Akan tetapi, tertundanya perizinan yang diperlukan dari pemerintah Indonesia membuat proyek tersebut tidak dapat dimulai.<sup>163</sup>

## 5.8 Bisnis-bisnis yang lebih kecil

Beberapa perusahaan yang lebih kecil milik Korindo meliputi:

- PT Dongbang Development – ini merupakan perusahaan di belakang bisnis real estat milik Korindo. Perusahaan ini mengelola kantor Korindo di Jakarta, Wisma Korindo lantai 16, dan 163 apartemen yang untuk disewakan ke pihak luar dan karyawan.<sup>164</sup>
- PT Magna Digital Lab – perusahaan ini memusatkan usahanya di bidang aplikasi digital.<sup>165</sup>
- PT Separindo Industry – ini merupakan usaha pemisah batere milik Korindon yang terletak di Cileungsi, dekat Jakarta di Pulau Jawa.<sup>166</sup>
- PT Bumi Indawa Niaga – sebuah perusahaan perdagangan.
- PT Korindo Konstruksi – sebuah perusahaan jasa konstruksi.<sup>167</sup>
- Dalam lamannya, Korindo menyatakan bahwa ia mempunyai perkebunan karet, tetapi tidak ada informasi yang dapat digali mengenai perkebunan karet tersebut.

## Kesimpulan

Praktik-praktik kelapa sawit Korindo tidak mematuhi hukum di Indonesia. Semua bukti mengarah pada penggunaan api secara luas dan sistematis oleh Korindo selama proses pembukaan lahan. Hal ini adalah tindakan ilegal di Indonesia. Korindo merupakan penyumbang yang relatif besar terhadap bencana kabut asap pada 2015 di Indonesia yang menyebabkan hampir 1 persen dari seluruh kebakaran.

Praktik-praktik kelapa sawit Korindo tidak memiliki komitmen keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan terkemuka yang menanam, menyuling, dan memperdagangkan minyak sawit. Dengan demikian Korindo sangat berisiko kehilangan konsumen-konsumen utama kelapa sawitnya. Dua pelanggan utama Korindo, Wilmar dan Musim Mas, baru saja menghentikan pengambilan pasokan dari Korindo.

Bahkan standar yang relatif longgar dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pun tidak memperbolehkan pembukaan hutan-hutan primer seperti yang dilakukan oleh Korindo. Banyak perusahaan terkemuka dalam rantai pasokan kelapa sawit menuntut standar yang jauh lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh RSPO.

Di Maluku Utara, Korindo jelas-jelas tidak menghormati hak-hak adat masyarakat lokal yang telah hidup di kawasan adat tersebut selama beratus-ratus tahun. Korindo seharusnya mengembalikan tanah itu kepada para pemiliknya.

Korindo menyebarkan praktik-praktiknya yang berbahaya kepada para konglomerat Korea lainnya seperti Posco Daewoo. Hal ini juga memberikan sebuah preseden membahayakan untuk eksploitasi komersial atas Papua yang menjadi tempat hutan hujan perawan terbesar yang masih tersisa di Indonesia. Selain praktik-praktik deforestasi dan pembakaran, perusahaan ini juga memiliki banyak tuduhan atas penggelapan pajak dan korupsi.

Korindo merupakan sebuah perusahaan yang sangat tertutup. Seharusnya perusahaan itu menerapkan transparansi, sehingga para konsumennya, investornya dan konsumen-konsumen di tingkat global yang dimilikinya dapat mengakses apakah kegiatan-kegiatan Korindo tetap menjalankan klaim-klaimnya yang meragukan sebagai sebuah perusahaan 'hijau' itu.

**Foto: Pembukaan hutan primer oleh PT Papua Agro Lestari (Korindo).**



© Mighty (foto drone); 4 Juni 2016; 6°45'42.90"Lintang Selatan, 140°48'28.38"Bujur Timur. Kredit: Yudhi Mahendra



# Referensi

- 1 Info Lowongan Kerja, Lowongan Kerja di PT Korindo Abadi, May 2016, <http://bit.ly/1ONoyDy>  
Korindo, About Chairman, <http://bit.ly/1TSxXh9>
- 2 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>  
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua, February – March 2004, pages 17 and 18, <http://bit.ly/1TwJ8sS>
- 3 Korindo, About Chairman, <http://bit.ly/1TSxXh9>
- 4 Misalnya, dalam kasus PT GMM, hanya satu referensi untuk sebuah izin perkebunan selama 2006 yang dapat ditemukan, dan menyatakan kawasan seluas 7.500 hektar. Sumber: Direktorat Jenderal Pertanian, Izin Usaha Perkebunan (IUP, *Izin Usaha Perkebunan*), <http://bit.ly/1XL0iaJ>. Izin pelepasan kawasan hutan untuk 2009 yang terdiri dari 11.000 hektar.
- 5 Hyosung Corporation and Subsidiaries, Laporan Keuangan Terkonsolidasi pada 31 Desember 2014, <http://bit.ly/24NgVGn>  
Hyosung Corporation and Subsidiaries, Laporan Keuangan Terkonsolidasi pada 31 Desember 2015, <http://bit.ly/1rH4oGn>
- 6 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemajuan dalam pelepasan kawasan Hutan, Mei 2015, <http://bit.ly/1R5haD5>
- 7 Majalah mingguan Korea Selatan SisaIN, perusahaan Korea ditolak karena ‘degradasi lingkungan’, (diterjemahkan dari bahasa Korea), 8 Juni 2016, <http://bit.ly/28MjdOu>
- 8 Sertifikasi MUTU, Pemberitahuan untuk Kegiatan Penilaian Sertifikasi ISPO di PT Tunas Sawa Erma – POP A dan POP B, 15 Oktober 2015, <http://bit.ly/1s6cDfN>
- 9 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Korindo Heavy Industry, 2016, <http://bit.ly/1XpilyY>  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Korindo Heavy Industry, 2012, <http://bit.ly/27Mqzvl>
- 10 *Nature Climate Change*, Belinda Arunarwati Margono, Peter V. Potapov, Svetlana Turubanova, Fred Stolle & Matthew C. Hansen, Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012, 29 June 2014, <http://bit.ly/1naAaJH>
- 11 Ir. Rachmat Witoclar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia 2004-2009, Juli 2006. Sumber: Andrew J. Marshall, Bruce M. Beehler, Ekologi Papua Indonesia Bagian Satu, 2006, <http://bit.ly/1WMJNOB>
- 12 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010, <http://sp2010.bps.go.id/>
- 13 Survival International, Suku-suku Papua, <http://bit.ly/1Vfr9gi>
- 14 Awas MIFEE, “Tiga Tahun MIFEE (bagian 2): Desa-desa Pertama yang Merasakan Dampak Luasnya Ancaman Perkebunan”, 23 Oktober 2013, <http://bit.ly/160gEGU>  
The International Coalition for Papua (ICF), HAM dan Perdamaian untuk, Website, <http://bit.ly/247k6GO>  
Human Rights Watch, Adakah sesuatu yang disembunyikan? Pembatasan Kebebasan Media dan Monitoring Hak di Papua, November 2015, <http://bit.ly/1TKFQ9S>
- 15 Pusaka, Awas MIFEE & organisasi lokal Papua, Atlas Kelapa Sawit Papua Barat: Perusahaan di belakang ledakan perkebunan, 5 Mei 2015, <http://bit.ly/1Mf5qR8>  
Quartz, Steve Mollman, Perbatasan baru kelapa sawit adalah hutan tropis yang membentang di pulau terbesar kedua di dunia, 26 Oktober 2015, <http://bit.ly/1MOWApM>
- 16 WWF International, Southeast Asia: Islands of Halmahera and Morotai, 2002, <http://wwf.to/23wyF6t>
- 17 WALHI Maluku Utara, Kronologi Konflik di Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan Kepulauan Joronga, <http://bit.ly/1QXuadP>  
WALHI Maluku Utara, Berebut Ruang Dengan Investasi, 2013, <http://bit.ly/1TAMVG7>
- 18 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>
- 19 Landsat 8 imagery.
- 20 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>
- 21 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>
- 22 Sudah ada analisa sebelumnya tentang api dari Korindo. Analisa ini dapat ditemukan di: Awas MIFEE, Merauke terbakar, tapi apakah perkebunan-perkebunan yang akan dituduh?, 20 November 2015, <http://bit.ly/28LFIFf>
- 23 Majalah mingguan Korea Selatan SisaIN, Apakah korporasi Korea merupakan pembakar hutan hujan tropis? (diterjemahkan dari bahasa Korea), 31 Mei 2016, <http://bit.ly/1UNjukp>
- 24 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009, Oktober 2009, <http://bit.ly/1mk2U0B>
- 25 Mongabay, Company ordered to pay record \$76m over fires in Sumatra, 12 August 2016, <http://bit.ly/2boYDa7>  
Jakarta Globe, Ministry of Environment and Forestry Wins Wildfire Lawsuit, 12 August 2016, <http://bit.ly/2aTOWph>  
Antara News, Walhi laporkan Sampoerna ke polisi, 26 February 2014, <http://bit.ly/2aVqoGM>
- 26 Ape Alliance, kasus bersejarah untuk Rawa Gambut Tripa dalam Ekosistem Leuser akhirnya menang terhadap perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam, 14 September 2015, <http://bit.ly/1T5Q015>
- 27 Hanim Kamaruddin (National University of Malaysia), Cecep Aminuddin (Institut Teknologi Bandung, Indonesia), Transboundary Haze Pollution and Accountability: Lansekap hokum di Indonesia dan Malaysia, 25 Agustus 2015, <http://bit.ly/1Nqw5gw>

- 
- 28 Antara Papua, Wagub Papua minta perusahaan penyebab kebakaran hutan ditutup, 20 October 2015, <http://bit.ly/28OCSRO>
- 29 Borneo News, Pembekuan Izin Melumpuhkan PT Korintiga Hutani Minggu, 17 January 2016, <http://bit.ly/1QEJ8oU>
- 30 Mutu certification international, Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat PHPL – PT Korintiga Hutani (announcement freezing of certificate), 16 February 2016, <http://bit.ly/29BWkgX>
- Mutu certification international, Pengumuman Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat PHPL – PT Korintiga Hutani (announcement revocation freezing status), 25 February 2016, <http://bit.ly/29HfiEC>
- 31 Majalah mingguan Korea Selatan SisaIN, Apakah korporasi Korea merupakan pembakar hutan hujan tropis? (diterjemahkan dari bahasa Korea), 31 Mei 2016, <http://bit.ly/1UNiukp>
- 32 FIRMS, Fire Information for Resource Management System, <http://go.nasa.gov/27awNFg>
- 33 Bank Dunia, Krisis Kabut Asap dan Kebakaran di Indonesia, 25 November 2015, <http://bit.ly/25SSZWc>
- 34 Global Fire Emissions Database (GFED), update terakhir, 16 November 2015, <http://bit.ly/1WJvDIG>
- 35 Sampai 16 November 2015. Global Fire Emissions Database (GFED), Last and final update, 16 November 2015, <http://bit.ly/1WJvDIG>
- 36 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan No. 35/PUU-X/2012, 16 May 2013, <http://bit.ly/1TQVSRU>
- Kepala UN CERD, Alexei Avtonomov, surat kepada Permanent Representative of Indonesia to the United Nations, 30 Agustus 2013, <http://bit.ly/1tiZ84R>
- 37 Kompas, Rp 30 Miliar untuk Tanah Ulayat, 4 June 2012, <http://bit.ly/28NUhYJ>
- 38 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>
- 39 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>
- 40 Yayasan Pusaka, Pimpinan PT. TSE Mengancam PHK kan Buruh Orang Asli Papua, 19 June 2016, <http://bit.ly/299XRvZ>
- 41 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>
- 42 Awas MIFEE, Catatan dari Kunjungan ke Perkebunan PT Dongin Prabhawa di Mam, 19 February 2014, <http://bit.ly/28UMUiw>
- Business & Human Rights Resource Centre, Korindo Group tidak merespon dugaan pelecehan terhadap para pekerja perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 18 Februari 2014, <http://bit.ly/28YuQaq>
- 43 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8I>
- 44 RSPO, About us, <http://bit.ly/1s9gmZi>
- 45 Korindo Website, About Chairman, <http://bit.ly/1TSxXh9> (diakses 13 Mei 2016)
- 46 Korindo Website, Green Tomorrow (video promosi), <http://bit.ly/1TfOUIQ>
- YouTube, The Korindo Group - Strength from Strength, <http://bit.ly/1XbDOAT>
- 47 Radar Indonesia, Korindo Peduli Ciliwung Langkah Nyata Cinta Alam Indonesia, August 2015, <http://bit.ly/1U6EPor>
- Satu Nusantara, Korindo Grup Indonesia Sumbangkan 50.000 Bibit Pohon untuk Timor Leste, August 2015, <http://bit.ly/1Xq1ISY>
- Harian Terbit, Komitmen Korindo dan Budiasi Terhadap Pelestarian Lingkungan, 25 February 2015, <http://bit.ly/22kuGLb>
- Indonesian Jurnal, Eksisi di Bisnis, Korindo juga Concern di Bidang Sosial, Lingkungan, Pendidikan, 31 March 2015, <http://bit.ly/25bJZYg>
- 48 Duta Wisata, KORINDO dan KOICA Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat Papua, 24 February 2016, <http://bit.ly/296fXir>
- 49 Wilmar, Wilmar International Umumkan Kebijakan untuk Melindungi Hutan dan Masyarakat, 5 Desember 2013, <http://bit.ly/1QviVF>
- Wilmar, Kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation*, 5 Desember 2013, <http://bit.ly/1hDCOBB>
- 50 Musim Mas Group, Musim Mas mengamini komitmennya untuk keberlanjutan, 4 Desember 2014, <http://bit.ly/1vyEi9C>
- Musim Mas Group, Sustainability Policy, December 2014, <http://bit.ly/1vyEi9C>
- 51 United Nations, International Labour Organization, Conventions and Recommendations, <http://bit.ly/1FIYJYd>
- 52 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN Guiding principles on business and human rights, 2011, <http://bit.ly/18WbEUy>
- 53 Apical Group, Sustainability Policy, September 2014, <http://bit.ly/1SOdxDz>
- Apical Group, Apical palm oil sourcing policy, 12 October 2015, <http://bit.ly/1NsO7i4>
- 54 Golden Agri-Resources Ltd, GAR Social and Environmental Policy (GSEP), 2016, <http://bit.ly/1Wuv7IX>
- 55 ADM, Komitmen Kami untuk No-Deforestation, Maret 2015, <http://bit.ly/1PKKgbe>
- ADM, Sustainability progress tracker, Palm oil, <http://bit.ly/27j5gBz> (accessed 13 May 2016)
- 56 Unilever, transformasi pasar terdepan dalam minyak sawit, <http://bit.ly/1AHHFgU>
- 57 Musim Mas, Tunas Sawa Erma: a moratorium on development with immediate effect, 9 August 2016, <http://bit.ly/2bxHvRC>
- 58 Musim Mas, Peta rantai pasokan, Agro Makmur Raya, Madidir, <http://bit.ly/29zkk9C>
- Musim Mas, Peta rantai pasokan, Agro Makmur Raya, Bitung, <http://bit.ly/29likNu>
- 59 Wilmar International, Peta rantai pasokan, <http://bit.ly/1UXR0t3>
- 60 ADM, Sustainability Progress Tracker, Palm Oil, Supply Chain Map, <http://bit.ly/1UEoA75>
- 61 IOI Loders Crocklaan, Taking responsibility, List of mills, <http://bit.ly/1O2ykXn> (perlu permohonan akses; diakses pada 12 Mei 2016)
- 62 Wilmar International, Peta rantai pasokan, <http://bit.ly/1UXR0t3>
- 63 WALHI Maluku Utara, Kronologi Konflik di Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, dan Kepulauan Joronga, <http://bit.ly/1QXuadP>

- 
- 64 Semut News, Tak Ada HGU, Kegiatan PT. Korindo Illegal, 15 Februari 2016, <http://bit.ly/27gaiCD>
- 65 Semut News, Tutup Akses Air Bersih, Walhi Polisikan Korindo, 11 Mei 2016, <http://bit.ly/1WrMxAz>
- 66 Malut Post, Warga Gane Tolak HGU PT Korindo, 19 Mei 2016, <http://bit.ly/1TEi4v1>  
Walhi and TuK Indonesia, Siaran Pers: Hentikan Penerbitan HGU PT Korindo Group di Gane, Maluku Utara, 26 Mei 2016, <http://bit.ly/28VUREV>
- 67 Malut Post, Korindo Tebang Kayu di Sumber Mata Air, 11 August 2016, <http://bit.ly/2bvylDd>  
Koran Radar Halmahera, PT Korindo ingkar kesepakatan bersama warga, 9 August 2016, <http://bit.ly/2aWl0Aa>
- 68 Citra Landsat 8 selama 21 sampai 29 Maret 2016 dan 30 April sampai 8 Mei 2016.
- 69 Kabar Pulau, Hutan Gane Barat Selatan Terbakar, 15 September 2015, <http://bit.ly/1QZML9d>
- 70 Majalah mingguan Korea Selatan SisaIN, Apakah korporasi Korea merupakan pembakar hutan hujan tropis? (diterjemahkan dari bahasa Korea), 31 May 2016, <http://bit.ly/1UNjukp>
- 71 Citra Landsat 8 selama 1 sampai 9 Januari 2016.
- 72 Citra Landsat 8 selama 29 Maret sampai 6 April 2016.
- 73 Fire Information for Resource Management System (FIRMS), <http://go.nasa.gov/27awNFg>
- 74 Kementerian Kehutanan Indonesia, pelepasan kawasan hutan untuk PT Berkat Cipta Abadi, 22 Juni 2011.
- 75 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8l>
- 76 Center for International Forestry Research (CIFOR), Working paper, The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua, a case study from Boven Digoel District, 2014, <http://bit.ly/1Ow7b8l>
- 77 Perbandingan citra satelit Sentinel-2 selama 11 Mei 2016 dengan peta tutupan hutan Kementerian Kehutanan Indonesia 2011.
- 78 Perbandingan citra Landsat dengan peta tutupan hutan Kementerian Kehutanan Indonesia 2009.
- 79 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, progress dalam pelepasan kawasan hutan, Mei 2015, <http://bit.ly/1R5haD5>
- 80 Majalah mingguan Korea Selatan SisaIN, Perusahaan Korea ditolak karena 'degradasi lingkungan', (diterjemahkan dari bahasa Korea) 8 Juni 2016, <http://bit.ly/28MJd0u>
- 81 Daewoo International, Daewoo Int'l to Produce Palm Oil in Indonesia, 8 September 2011.
- 82 Norges Bank Investment Management, Keputusan untuk mengeluarkan perusahaan-perusahaan dari Government Pension Fund Global, 17 Agustus 2015, <http://bit.ly/1ESb7Ny>
- 83 Dewan Etik untuk Pension Fund Global Pemerintah Norwegia, Rekomendasi 2014 dan 2015 tentang Daewoo International Corporation, POSCO, Genting Berhad dan IJM Corporation Berhad, <http://bit.ly/1USLCoF>
- 84 The Government Pension Fund Global, Laporan tentang investasi yang bertanggung jawab, 5 Februari 2015, halaman 72, <http://bit.ly/1vZpeBW>
- 84 Awas MIFEE, Merauke terbakar, tapi apakah perkebunan-perkebunan yang akan dituduh?, 20 November 2015, <http://bit.ly/28LFIFf>
- 85 Perbandingan citra Landsat 7 selama 8 Mei sampai 9 Juni 2016 dengan peta tutupan hutan Kementerian Kehutanan Indonesia 2011.
- 86 Korindo, About Chairman, <http://bit.ly/1TSxXh9>
- 87 Panama Offshore Leaks, Eun-Ho Seung, <http://bit.ly/1sqlGle>  
Panama Offshore Leaks, Seung Eun Ho, <http://bit.ly/1VxvFlw>
- 88 Dongwha Enterprise, In Memory of Founder Seung Sang-bae, <http://bit.ly/1Ou0h5r>
- 89 Dongwha, History of Dongwha, <http://bit.ly/1Xs2g1m>  
Samsung Economic Research Institute, Asia's Business Moguls: Korindo's Integrity Drives It to Success, 13 Agustus 2007, <http://bit.ly/1R2pxPX>
- 90 Bloomberg, Company Overview of Korindo Group PT, <http://bloom.bg/251AZZg>
- 91 Akta Notaris perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Korindo.  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Korindo Heavy Industry, 2016, <http://bit.ly/1XpILyY>
- 92 Bursa Efek Korea (KRX), Dongwha Enterprise, <http://bit.ly/1TcOHoc>
- 93 Dongwha Enterprises, Laporan tahunan 2015, 30 Maret 2016, halaman 13, <http://bit.ly/1Os9d0f>  
Exchange-Rates.org, US Dollars (USD) to Korean Won (KRW) nilai kurs untuk 31 Desember 2015, 1 USD = 1,180.21 KRW, <http://bit.ly/1ThnrAi>
- 94 Dongwha Enterprise, Business, <http://bit.ly/1ZSO4x7>  
Dongwha Enterprises, Laporan tahunan 2015, 30 Maret 2016, <http://bit.ly/1Os9d0f>
- 95 Dongwha Enterprises, Laporan tahunan 2015, 30 Maret 2016, halaman 284, <http://bit.ly/1Os9d0f>
- 96 Bloomberg, Company Overview of Korindo Group PT, <http://bloom.bg/28MXZnR>
- 97 Website Korindo, Affiliated Companies, <http://bit.ly/1XbmPP3>
- 98 ITTO, Reviving tropical plywood, May 2004, <http://bit.ly/20hZxag>
- 99 Berton-ton kayu lapis yang diekspor Indonesia turun 30% pada 2003-2014. Sumber: International Trade Center (ITC), HS code 4412 group, plywood, veneered panels and similar laminated wood. Berdasarkan statistic UN Comtrade, <http://bit.ly/1zeXtXi>
- 100 International Trade Center (ITC), HS code 4412 group, plywood, veneered panels and similar laminated wood. Based on UN Comtrade statistics, <http://bit.ly/1zeXtXi>



- 101 PT Korindo Ariabima Sari. Mutu Hijau Indonesia, Resume Hasil Verifikasi, PT Korindo Ariabima Sari, 2016, <http://bit.ly/2b7Kccx>.  
Mutu certification international, Verifikasi Legalitas Kayu PT Korindo Abadi, 3 Desember 2015, <http://bit.ly/1WFnJVM>.  
Mutu certification international, Verifikasi Legalitas Kayu, PT Balikpapan Forest Industries, 1 April 2016, <http://bit.ly/28UxNcA>.
- 102 Korindo, Website, Plywood products, 2010, <http://bit.ly/1U6Ldz5>
- 103 Korindo Website, Asiki Division, <http://bit.ly/1sME2DR>
- 104 PT Ayamaru Sertifikasi, Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), PT Tunas Timber Lestari, Maret 2016, <http://bit.ly/1XDHNao>
- 105 PT Equality Indonesia, Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), PT Inocin Abadi, 4 Januari 2016, <http://bit.ly/1Tntt03>
- 106 Produksi yang dilaporkan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Boven Digoel 2013, <http://bit.ly/1W7tOd2>
- 107 Sertifikasi internasional Mutu, Verifikasi Legalitas Kayu PT Korindo Abadi, 3 Desember 2015, <http://bit.ly/1WFnJVM>
- 108 PT Equality Indonesia, Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT Medco Papua Industri Lestari, 1 November 2012, <http://bit.ly/1VcXfsz>  
LG International Corp, Laporan tahunan 2013, 7 Maret 2014, <http://bit.ly/1TQUjDg>  
LG International, LGI Enters Industrial Forestation Business In Indonesia, 30 September 2009, <http://bit.ly/1WZNIIMt>
- 109 PT Ayamaru Sertifikasi, Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), PT Balikpapan Wana Lestari, Maret 2016, <http://bit.ly/1TRa8nt>
- 110 Sertifikasi internasional Mutu, Verifikasi Legalitas Kayu, PT Balikpapan Forest Industries, 1 April 2016, <http://bit.ly/28UxNcA>
- 111 Ciputra News, Balikpapan Forest Industries Tutup Mulai 26 Desember, 21 Desember 2012, <http://bit.ly/1Tt6iDK>  
Pro Kaltim, Ingin Eksis, Kayu Lapis Harus Efisien Kamis, 2 January 2014, <http://bit.ly/25esTwm>
- 112 PT Equality Indonesia, Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT Trisetia Intiga, 18 Februari 2015, <http://bit.ly/1TnG82Q>  
PT Equality Indonesia, Directory Customer Certified (VLK), <http://bit.ly/27Gnlte>
- 113 PT Equality Indonesia, Performance assessment Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), PT Trisetia Intiga, 16 March 2016, <http://bit.ly/2avcA3O>  
PT Equality Indonesia, Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT Trisetia Intiga, 18 Februari 2015, <http://bit.ly/1TnG82Q>
- 114 Mutu certification international, Verifikasi Legalitas Kayu, PT Korindo Ariabima Sari, 12 Maret 2015, <http://bit.ly/1XnISC8>
- 115 Mutu Hijau Indonesia, Resume Hasil Verifikasi, 2016, <http://bit.ly/2b7Kccx>
- 116 AlamatKantorIndonesia.com, PT Korindo Ariabima Sari, 10 September 2013, <http://bit.ly/1rYGDtv>
- 117 Borneo News, PT Korindo Melunak, Pekerja Batal Mogok Massal, 26 Februari 2016, <http://bit.ly/23cDotT>
- 118 Harian Umum Tabengan, Gubernur Kalteng Peringatkan PT Korindo, 2 August 2016, <http://bit.ly/2aFqJ0V>
- 119 Pro Kaltim, Ingin Eksis, Kayu Lapis Harus Efisien Kamis, 2 Januari 2014, <http://bit.ly/25esTwm>  
Borneo News, PT Korindo Melunak, Pekerja Batal Mogok Massal, 26 Februari 2016, <http://bit.ly/23cDotT>  
Papua Pos, Olah Hutan Dengan Sistem HPH, Serap Sekitar 4000 Karyawan, tidak ada tanggal (kemungkinan sebelum 2013), <http://bit.ly/1RqjLb2>
- 120 Transcontinental Indenting Co., Korindo, <http://bit.ly/1TRN9Zz>
- 121 Gulf Cooperation Council (GCC). Anggota-anggotanya adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.
- 122 Arabian Business, Wood Working, 18 April 2009, <http://bit.ly/1WcGsr3>
- 123 Sertifikasi internasional Mutu, Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), PT Korintiga Hutani, 12 Februari 2016, <http://bit.ly/27Gqvt0>
- 124 Sertifikasi internasional Mutu, Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT Korintiga Hutani, September 2015, <http://bit.ly/1XDX62v>
- 125 Marubeni, Laporan Tahunan 2015, halaman 185, <http://bit.ly/1qv67wz>  
FSC, Certificate data PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, <http://bit.ly/1RcJfsf>
- 126 SGS, Laporan sertifikasi kayu terkendali, PT Korintiga Hutani, 28 Agustus 2014, halaman 27, <http://bit.ly/25d8xUI>
- 127 Oji Holdings Corporation, Notice Regarding Loss on Stock Evaluation of Subsidiaries and Affiliates and Differences between the Forecasts and the Results for the Year ended March 2016, 13 Mei 2016, <http://bit.ly/1sq18PG>
- 128 Oji Holdings Corporation, Overseas Activities, <http://bit.ly/1TXxQyf>  
Asian Legal Business, September 2015, halaman 25, <http://bit.ly/27ycbqq>
- 129 Global Wood, Maret 2014, <http://bit.ly/1sxlRMK>  
Surya Karya, DPD: Investasi di Daerah Sejahterakan Rakyat, 26 Juli 2013, <http://bit.ly/1Wj6wRA>
- 130 Korindo, presentation, Korindo plants the Green, September 2013, <http://bit.ly/1OSJaQc>
- 131 Mutu certification international, Verifikasi Legalitas Kayu, PT Belantara Subur, 29 Juli 2015, <http://bit.ly/1RdASwr>
- 132 Berita Papua, PT. Korindo diminta berinvestasi di Papua, 7 September 2015, <http://bit.ly/28BP1QE>  
Antara News, Korindo minta lahan uji coba di Papua, 4 September 2015, <http://bit.ly/1WMDSlz>
- 133 Korindo, Paper Business, <http://bit.ly/1WzZSqi>  
Azbil Corporation, PT Aspex Kumbong, 2016, <http://bit.ly/22dmU5Q>  
Papermart, Drums and DIPs for improved news, 15 April 2013, <http://bit.ly/1OuMNM3>
- 134 Liputan, Tujuh Jam Sebelum Surat Kabar Terbit, May 2015, <http://bit.ly/1sqV36i>  
Kompas, Pabrik Kertas Terpaksa Tutup, 31 Maret 2008, <http://bit.ly/1rOuerS>  
Kompas Gramedia, Newspaper, <http://bit.ly/28QjxNT>

- 
- 135 Oceanic Holding, Paper Import, Newsprint Grade, <http://bit.ly/1TRw15H>
- 136 i-Graphix.com, Newsprint alternative offered by Oceanic, 15 Januari 2011, <http://bit.ly/1ZW8bKG>
- 137 Korindo, Paper Business, <http://bit.ly/1WzZSqi>  
Andritz, Andritz to supply stock preparation equipment to P.T. Aspex Kumbong, Indonesia, 10 Agustus 2010, <http://bit.ly/1ZW9ppw>
- 138 Forest Stewardship Council, Certificate PT Aspex Kumbong, <http://bit.ly/1Tves1F>
- 139 Kousa International, Paper, <http://bit.ly/1Tj9GRw>  
Fredricks Communications, Kousa International, <http://bit.ly/1Th9xiP>
- 140 [www.tradesparq.com](http://www.tradesparq.com), seperti diperiksa pada 23 Mei 2016.
- 141 Korea Times, Korindo head probed for alleged tax evasion, 6 October 2014, <http://bit.ly/1TV5wiR>
- 142 Korea's National Tax Service, April 2016, <http://bit.ly/1Vi5KD0> (in Korean)
- 143 Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK, Financial Services Authority), PT NongHyup Korindo Securities Indonesia, <http://bit.ly/1TxasMd>
- 144 PT NongHyup Korindo Securities Indonesia, Products, <http://bit.ly/22iWbVE>
- 145 The Korea Times, NongHyup takes 2nd place by assets, 14 April 2015, <http://bit.ly/1svVifB>
- 146 Meritz Korindo Insurance, About us, <http://bit.ly/1sJlLHr>  
Meritz Korindo Insurance, Financial Statements 2015, <http://bit.ly/1YKXF8V>
- 147 Website Korindo, Affiliated Companies, <http://bit.ly/1XbmPP3>
- 148 Korindo Wind, Website, <http://bit.ly/1TrA1Lb>  
Korindo Wind, Equipped for precision, <http://bit.ly/22iSG10>
- 149 [www.tradesparq.com](http://www.tradesparq.com), sebagaimana diperiksa pada 23 Mei 2016.
- 150 Daily Advance, Wind energy blows into area -- piece by mammoth piece, 26 Mei 2016, <http://bit.ly/1UhUzbo>
- 151 <http://portexaminer.com>
- 152 Korindo Wind, Frequently Asked Questions, <http://bit.ly/1Ps6v68>  
Korindo Wind, YouTube video, Korindo Heavy Industry - Wind Tower Division, Mei 2016, <http://bit.ly/28QhYjV>
- 153 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Korindo Heavy Industry, 2016, <http://bit.ly/1XpILyY>  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Korindo Heavy Industry, 2012, <http://bit.ly/27Mqzvl>
- 154 Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Oil and Gas, Korindo Heavy Industry, 2016, <http://bit.ly/1XpILyY>  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Korindo Heavy Industry, 2012, <http://bit.ly/27Mqzvl>
- 155 SGP Business (director bisnis dan perusahaan di Singapura), Korindo Energy (Singapore) Pte Ltd, <http://bit.ly/1swxMPF>
- 156 Korindo Energy, Brochure, <http://bit.ly/27MD9eg>
- 157 Hyundai Motor Company, Webmagazine, spring 2007, <http://bit.ly/1OGAoze>
- 158 The Korea Herald, Hyundai ends bus supply contract with Korindo, 26 Februari 2012, <http://bit.ly/1NEAhtI>  
Inilah, Korindo Tuduh Hyundai Putus Kontrak Sepihak. 16 Maret 2012, <http://bit.ly/1YNuXnK>
- 159 Korindo, Automotive components, motorcycle components, industrial parts, <http://bit.ly/1swyBrQ>
- 160 Antara News, Bakrie optimalkan pabrik komponen eks-Korindo, 30 April 2013, <http://bit.ly/1YNCQd9>
- 161 Detik News, Jaksa Tahan Dirut Korindo Motors terkait Kasus Korupsi TransJ 2013, 26 Maret 2015, <http://bit.ly/1TDHpXd>  
Bara news, MA Perberat Vonis Udar, Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang Juga Terbukti Kamis, 24 Maret 2016, <http://bit.ly/27PCubU>  
Tempo, Transjakarta Lunasi Bus Sisa Pengadaan Era Udar Pristono, 23 Desember 2015, <http://bit.ly/1TxDA4L>  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014, <http://bit.ly/1s3RwdJ>
- 162 Korindo, Special Vehicles, <http://bit.ly/1ORAK5g>
- 163 Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A.P.I. de C.V., U.S.\$ 120,000,000 2.875% Guaranteed Notes due 2019 (Unconditionally and Irrevocably Guaranteed by Korea Resources Corporation), 24 Juni 2015, <http://bit.ly/1W9lpVc>  
Yosefardi, Coal Journal: South Korean Players, 23 September 2014, <http://bit.ly/22kcS2R>
- 164 Korindo, Real Estate Management Business, <http://bit.ly/24ijrSX>  
Daftar Alamat Lengkap Perusahaan, PT Dongban Development, <http://bit.ly/25A6Osi>
- 165 Warta Buana, SACIVA, Aplikasi Yang Mampu Simpan Ribuan Kartu Nama, 14 Mei 2016, <http://bit.ly/1TXBPzf>  
Duta Wisata, Korindo Group Semarang Dua Tahun Forwan Berbagi Kasih, 15 Mei 2016, <http://bit.ly/1TXDJyn>
- 166 AlamatKantorIndonesia.com, PT Separindo Industry, 5 Agustus 2015, <http://bit.ly/24UjWF3>
- 167 Capital Province of Jakarta, Izin Usaha Jasa Konstruksi PT Korindo Konstruksi, 8 Juni 2015, <http://bit.ly/28T8IK7>